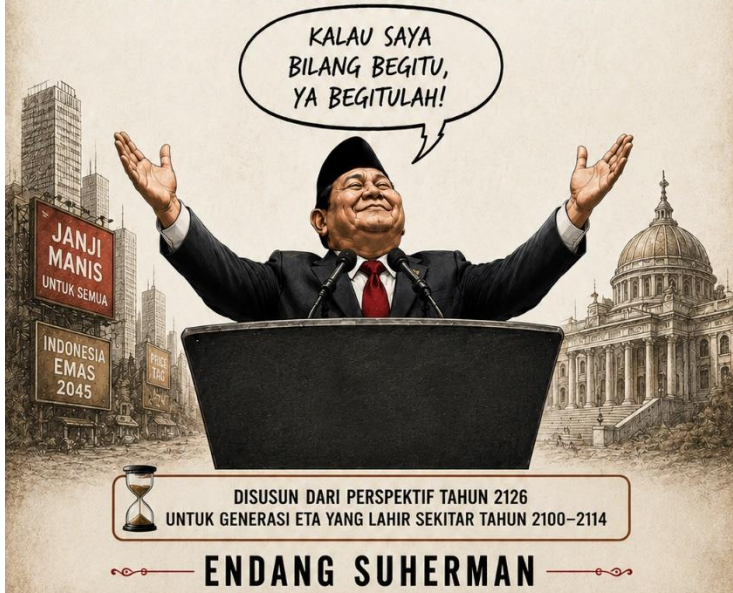


— ★ SERI SATIRE POLITIK ★ —

REPUBLIK OMON-OMON

100 TAHUN WARISAN JARGON POLITIK INDONESIA RAYA



DISUSUN DARI PERSPEKTIF TAHUN 2126
UNTUK GENERASI ETA YANG LAHIR SEKITAR TAHUN 2100–2114

— ENDANG SUHERMAN —

Seri Satire Politik

REPUBLIK OMON-OMON

100 Tahun Warisan
Jargon Politik Indonesia Raya

Disusun dari Perspektif
Tahun 2126 untuk Generasi Eta
yang lahir sekitar tahun 2100–2114

Endang Suherman

Seri Satire Politik

REPUBLIK OMON-OMON

100 Tahun Warisan Jargon Politik Indonesia Raya

Disusun dari Perspektif Tahun 2126 untuk Generasi Eta yang lahir sekitar tahun 2100–2114

Hak Cipta © 2026 Endang Suherman

HAK PUBLIKASI TERBUKA

Buku ini disediakan untuk kepentingan edukasi, literasi kebangsaan, dan diskusi publik. Penulis mengizinkan siapa pun untuk mengunduh, menyimpan, memperbanyak, mencetak, membagikan, dan menyebarkan buku ini, baik dalam bentuk digital maupun cetak, tanpa memerlukan izin tertulis terlebih dahulu.

Pembaca, komunitas, lembaga pendidikan, organisasi masyarakat, media, maupun instansi pemerintah dipersilakan mendistribusikan buku ini secara bebas selama isi naskah tidak diubah secara substantif dan nama penulis tetap dicantumkan dengan benar. Kutipan, reproduksi sebagian maupun seluruh isi buku, serta pencetakan ulang untuk tujuan pendidikan, penelitian, diskusi publik, dan penyebaran pengetahuan diperbolehkan dengan tetap menyebutkan sumber dan penulis.

Penulis berharap buku ini dapat dibaca, didiskusikan, dan disebarluaskan seluas-luasnya sebagai kontribusi pemikiran bagi keberlanjutan, persatuan, dan masa depan Republik Indonesia.

"Silakan dibaca, dibagikan, dan dicetak. Pengetahuan akan lebih bermanfaat ketika dapat diakses oleh sebanyak mungkin warga bangsa."

INFORMASI PENERBITAN

Penulis: Endang Suherman

Konsep Kreatif: Republik Retorika Project

Teknologi Pendukung: Kecerdasan Buatan (*Artificial Intelligence/AI*) sebagai alat riset, pengembangan ide, dan simulasi naratif

Penerbit: Self Publishing Media

Situs Web: <https://selfpublishing.biz.id/>

Email: selfpublishingedition@gmail.com

Pre-Order Buku Cetak: +62 895-3821-41678

Versi e-Book Dibuat Pertama Kali: Juni 2026

Baca dan Unduh Online (gratis): <https://bukuonline.my.id/>

DISCLAIMER

Buku ini merupakan karya satire politik, kritik budaya, dan dokumentasi imajiner yang ditulis dari sudut pandang fiktif tahun 2126. Seluruh tokoh publik, peristiwa politik, slogan, jargon, kutipan populer, serta fenomena sosial yang dibahas dalam buku ini ditempatkan sebagai objek pengamatan budaya dan artefak retorika dalam sebuah konstruksi naratif satiris. Buku ini tidak dimaksudkan sebagai biografi, laporan investigasi, dokumen sejarah resmi, maupun representasi lengkap atas individu, kelompok, lembaga, atau peristiwa yang disebutkan.

Sebagian dialog, istilah, klasifikasi arsip, catatan kurator, laporan antropolog digital, dan komentar akademik yang muncul di dalam buku ini merupakan perangkat sastra yang digunakan untuk membangun suasana fiksi dokumenter dan humor intelektual.

Setiap kemiripan dengan situasi nyata merupakan bagian dari konteks sosial-politik yang menjadi objek refleksi publik.

Tujuan utama buku ini adalah mendorong pembaca untuk melihat hubungan antara politik, komunikasi, media, kekuasaan, dan budaya populer melalui pendekatan satire.

Karena itu, buku ini sebaiknya dibaca dengan secangkir kopi, sedikit rasa humor, dan kemampuan membedakan antara arsip sejarah, arsip imajinasi, serta arsip omon-omon.

KATALOG DALAM TERBITAN (KDT)

Endang Suherman

Republik Omon-Omon: 100 Tahun Warisan Jargon Politik Indonesia Raya / Endang Suherman. — Ed. 1. — Jakarta: Self Publishing Media, 2026.

108 hlm.; 14,8 x 21 Cm.

Diterbitkan independen (self published) tanpa ISBN

1. Satire Politik Indonesia
2. Komunikasi Politik
3. Retorika Politik
4. Budaya Demokrasi
5. Kritik Sosial

I. Judul

"Sejarah Indonesia tidak selalu ditulis dengan tinta. Sebagiannya ditulis dengan mikrofon. Sebagiannya ditulis dengan baliho. Dan sebagiannya lagi ditulis dengan omon-omon."

PENGANTAR

Arkeologi Kata-Kata Politik

Buku ini lahir dari satu pertanyaan sederhana: mengapa dalam politik Indonesia, kata-kata sering hidup lebih lama daripada kebijakan? Sepanjang sejarah republik, pergantian pemimpin datang dan pergi. Program pembangunan silih berganti. Slogan berubah mengikuti zaman. Namun satu hal tampaknya selalu bertahan: kemampuan politik untuk memproduksi retorika dalam jumlah yang hampir tak terbatas.

Seri Satire Politik Republik Omon-Omon: 100 Tahun Warisan Jargon Politik Indonesia Raya bukanlah biografi, bukan pula kajian akademik tentang satu tokoh tertentu. Buku ini adalah satire. Sebuah upaya melihat kembali kehidupan politik Indonesia melalui kaca pembesar humor, ironi, dan imajinasi masa depan.

Melalui perspektif penulis di tahun 2126, saya mencoba membayangkan bagaimana generasi masa depan membaca warisan politik abad ke-21. Apa yang mereka lihat ketika membuka arsip-arsip lama? Apakah mereka akan menemukan data dan kebijakan? Ataukah mereka justru menemukan lautan slogan, *podcast*, debat, baliho, tagar, dan potongan video yang pernah menguasai ruang publik Indonesia?

Meski ditulis dalam nada satiris, buku ini berangkat dari kenyataan yang dapat ditemukan dalam sejarah politik Indonesia modern. Karena itu, setiap bab berusaha merujuk pada fakta, peristiwa, fenomena sosial, dan sumber-sumber yang dapat dipertanggungjawabkan. Satire dalam buku ini tidak dimaksudkan untuk mengaburkan kenyataan, melainkan untuk membantu melihat kenyataan dari sudut yang berbeda.

Saya percaya bahwa demokrasi membutuhkan kritik, sebagaimana kritik membutuhkan kebebasan untuk tersenyum pada dirinya sendiri. Sebab ketika sebuah bangsa kehilangan kemampuan menertawakan retorikanya sendiri, saat itulah ia mulai terlalu serius mempercayai semua janji yang didengarnya.

Semoga buku ini dapat dibaca sebagai catatan zaman, arsip budaya politik, sekaligus pengingat bahwa di negeri ini, sejarah tidak hanya ditulis oleh para pemenang. Sebagian sejarah juga ditulis oleh slogan yang terus diulang, mikrofon yang tak pernah mati, dan omon-omon yang bertahan jauh lebih lama daripada yang pernah dibayangkan para pembuatnya.

Selamat membaca
Jakarta, 2026
Penulis

DAFTAR ISI

Cover Buku / 1

Halaman Judul / 2

Halaman Hak Cipta / 3

Pengantar Penulis / 6

Prolog : Selamat Datang di 2126 / 10

Bab 1 : Zaman Keemasan Omon-Omon / 16

Bab 2 : Makan Siang Gratis / 24

Bab 3 : Ndasmu Etika / 32

Bab 4 : Republik Podcast / 40

Bab 5 : Netizen: Suku Terbesar Indonesia / 48

Bab 6 : Kementerian Pencitraan Republik Indonesia / 56

Bab 7 : Dinasti, Oligarki, dan Kerabat Nasional / 64

Bab 8 : Pemilu Sebagai Festival Nasional / 72

Bab 9 : Indonesia Emas atau Emas Indonesia? / 80

Bab 10 : 100 Tahun Omon-Omon / 88

Epilog : Museum Jargon Nasional / 95

Glosarium / 98

Daftar Pustaka / 103

Tentang Penulis / 107

PROLOG

SELAMAT DATANG DI TAHUN 2126



PROLOG

Selamat Datang di Tahun 2126

Jika Anda sedang membaca buku ini, besar kemungkinan Anda adalah bagian dari Generasi Eta—generasi yang lahir pada periode tahun 2100–2114, ketika sebagian besar persoalan politik sudah dikelola oleh kecerdasan buatan, arsip digital otomatis, dan algoritma yang lebih sabar daripada manusia.

Bagi Anda, mungkin sulit membayangkan bagaimana leluhur republik ini pernah menjalankan negara. Mereka memiliki satelit. Mereka memiliki internet. Mereka memiliki superkomputer. Tetapi mereka tetap memilih bertengkar melalui slogan.

Buku ini tidak ditulis untuk menghakimi masa lalu. Buku ini ditulis untuk mendokumentasikannya. Karena sebagaimana setiap peradaban meninggalkan warisan berupa kuil, prasasti, atau manuskrip, dan Indonesia abad ke-21 meninggalkan sesuatu yang tidak kalah monumental: jargon politik.

Mereka hadir di mana-mana. Di baliho. Di televisi. Di debat. Di *podcast*. Di media sosial. Di grup percakapan keluarga. Bahkan kadang-kadang muncul lebih sering daripada kebijakan itu sendiri.

Para sejarawan digital abad ke-22 menyebut periode tersebut sebagai: Era Retorika Nasional. Suatu masa ketika kata-kata memiliki umur politik lebih panjang daripada program kerja.

Janji dapat bertahan bertahun-tahun. Slogan dapat bertahan satu dekade. Tetapi penjelasan rinci sering kali hilang setelah konferensi pers berakhir.

Di antara sekian banyak tokoh yang menghuni era itu, terdapat satu figur yang menempati ruang penting dalam arsip retorika nasional. Tanpa perlu menyebutkannya, otak dan pikiran kita pasti tertuju pada satu nama ini. Bukan semata karena jabatan yang pernah diembannya. Bukan pula karena kemenangan politiknya. Melainkan karena kemampuannya menghasilkan kalimat-kalimat yang terus hidup jauh melampaui konteks aslinya.

Sebagian menjadi kutipan. Sebagian menjadi meme. Sebagian menjadi slogan. Dan sebagian lagi berubah menjadi bahan penelitian para antropolog digital, pada 100 tahun kemudian.

Buku ini adalah upaya mendokumentasikan fenomena tersebut. Bukan sebagai biografi. Bukan sebagai laporan politik. Melainkan sebagai koleksi artefak kebudayaan. Karena pada akhirnya, politik bukan hanya soal siapa yang berkuasa. Politik juga soal kata-kata yang diwariskan kepada generasi berikutnya. Dan republik ini, sepanjang sejarahnya, tidak pernah kekurangan kata-kata.

"Kami menemukan ribuan jam pidato, jutaan unggahan media sosial, dan miliaran komentar politik. Setelah dianalisis selama enam tahun oleh kecerdasan buatan, kesimpulannya sederhana: Sebagian besar rakyat Indonesia abad ke-21 tidak kekurangan informasi. Mereka hanya tenggelam di dalamnya."

— **Arsip Nasional Republik Retorika, Edisi 2126**

Maka sebelum Anda membuka halaman berikutnya, siapkan secangkir kopi. Matikan notifikasi. Dan ingatlah satu hal: sejarah Indonesia tidak selalu ditulis dengan tinta. Sebagian ditulis dengan mikrofon. Sebagian ditulis dengan

baliho. Dan sebagian lagi ditulis dengan omon-omon. Selamat datang di arsip besar republik kata-kata.

ARSIP NASIONAL REPUBLIK RETORIKA

Arsip No. 001

MIKROFON POLITIK

Kategori: Artefak Produksi Janji

Periode Penggunaan: ±1945–2035

Status: Sangat Berpengaruh

Lokasi Penemuan: Bekas studio televisi politik dan ruang konferensi pers nasional

Keterangan Kurator

Benda ini digunakan oleh para pemimpin, calon pemimpin, mantan pemimpin, calon mantan pemimpin, juru bicara, pengamat, *influencer* politik, hingga warga biasa yang merasa dirinya layak menjadi pemimpin. Fungsi utamanya adalah memperbesar suara manusia. Namun dalam praktik politik Indonesia abad ke-21, mikrofon memiliki fungsi tambahan yang jauh lebih penting: mengubah opini menjadi pidato, pidato menjadi berita, berita menjadi perdebatan, dan perdebatan menjadi kebisingan nasional.

Para peneliti sejarah komunikasi menemukan bahwa sebagian besar peristiwa politik besar pada masa itu selalu diawali oleh seseorang yang berdiri di depan mikrofon. Jarang sekali diawali oleh seseorang yang membaca laporan setebal 400 halaman. Karena itulah mikrofon kemudian dianggap sebagai salah satu teknologi paling berpengaruh dalam demokrasi Indonesia modern.

Catatan Sejarahwan Digital (2126)

Pada awal abad ke-21, masyarakat Indonesia memiliki akses terhadap informasi dalam jumlah terbesar sepanjang sejarah. Namun anehnya, mereka tetap lebih mempercayai kalimat yang diucapkan dengan suara lantang dibanding data yang disampaikan dengan tenang. Fenomena ini kemudian dikenal sebagai: Hukum Akustik Demokrasi. Bunyinya:

Semakin keras sebuah pernyataan disampaikan, semakin besar kemungkinan publik menganggapnya penting. Meskipun tidak selalu benar.

Hasil Penelitian Arkeologi Politik

Analisis terhadap ribuan rekaman pidato periode 2000–2035 menunjukkan bahwa mikrofon paling sering digunakan untuk mengucapkan kata-kata berikut: rakyat, perubahan, masa depan, kesejahteraan, komitmen, Reformasi, Indonesia Emas. Sementara kata: "evaluasi" dan "tanggung jawab" muncul jauh lebih jarang. Para peneliti masih memperdebatkan penyebab fenomena tersebut.



Laporan Kondisi Artefak

Objek ini ditemukan dalam keadaan baik. Tidak ditemukan kerusakan fisik. Namun sebagian besar isi yang pernah direkam melalui benda ini tidak berhasil ditemukan dalam kenyataan.

Peringatan Museum

Pengunjung dilarang menyalakan artefak ini tanpa pengawasan petugas. Percobaan pada tahun 2117 menunjukkan bahwa satu mikrofon politik aktif mampu menghasilkan: 17 janji baru, 8 slogan

nasional, 3 kontroversi media sosial, dan 1 survei elektabilitas dalam waktu kurang dari dua jam.

Kesimpulan Kurator

Banyak bangsa membangun sejarahnya dengan pedang. Sebagian dengan mesin industri. Indonesia abad ke-21 memilih jalan yang berbeda. Mereka membangunnya dengan mikrofon. Dan seperti semua benda bersejarah yang berpengaruh besar, mikrofon politik meninggalkan warisan yang sulit diukur: lebih banyak kata-kata daripada keheningan.

ZAMAN KEEMASAN OMON-OMON

KETIKA JANJI POLITIK
MENJADI CABANG HIBURAN NASIONAL

“

Bangsa ini tidak kekurangan pemimpin. Yang kami kekurangan hanya satu: pemimpin yang tidak menganggap pidato sebagai pekerjaan utama.

— Sejarawan Digital, 2126

”

Selamat datang di abad di mana kata-kata lebih cepat dari kerja nyata.

Di abad ketika pidato menjadi konten, dan janji menjadi komoditas.

Inilah kisah tentang satu fenomena besar yang mewarnai perjalanan politik Indonesia:

OMON-OMON.

Ucapan besar.
Janji panjang.
Realisasi yang entah di mana.
Dan tepuk tangan yang selalu ada.

Selama satu abad penuh,
omon-omon bukan sekadar ucapan.
Ia adalah budaya.
Ia adalah industri.
Ia adalah agama baru.
Dan ia juga hiburan paling murah
untuk bangsa yang capek berharap.

★ CATATAN KURATOR (2126)

Ansip menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia abad ke-21 lebih mudah mengingat pidato 2 jam, daripada kebijakan 2 halaman.



BAB 1

ZAMAN KEEMASAN OMON-OMON

Ketika Janji Politik Menjadi Cabang Hiburan Nasional

Para sejarawan abad ke-22 sepakat bahwa Indonesia memasuki fase paling unik dalam sejarah demokrasinya sekitar awal dekade 2020-an. Masa itu kemudian dikenal sebagai *Zaman Keemasan Omon-Omon*—periode ketika batas antara politik, hiburan, pemasaran digital, dan industri konten runtuh sepenuhnya seperti atap gedung proyek yang diresmikan terlalu cepat. Pada era tersebut, rakyat Indonesia tidak lagi mengalami kampanye politik. Mereka mengalaminya sebagai musim hiburan nasional.

Televisi menyiarkan debat layakanya pertandingan tinju. Media sosial memperlakukan calon pemimpin seperti idol digital. Dan rakyat menjadi penonton aktif yang setiap hari mengonsumsi slogan politik sebagaimana mereka mengonsumsi video resep mie instan dan drama perselingkuhan artis.

Pemilu bukan lagi pertarungan ide. Ia telah berevolusi menjadi kompetisi algoritma perhatian. Para kandidat perlahan memahami satu hukum baru demokrasi digital: Dalam politik modern, yang penting bukan benar atau salah. Yang penting adalah *engagement*.

Akibatnya, isi pidato menjadi semakin pendek, semakin emosional, dan semakin mudah dipotong menjadi video vertikal berdurasi belasan detik.

Para konsultan politik menyebutnya: “optimalisasi resonansi publik”. Para akademisi menyebutnya: “penyederhanaan demokrasi”. Sementara rakyat biasa menyebutnya: “konten”.

Pada tahun 2024, rakyat Indonesia tidak lagi memilih pemimpin berdasarkan program kerja. Mereka memilih berdasarkan kemampuan membuat potongan video TikTok berdurasi 17 detik. Potongan video itu biasanya memiliki ciri khas: musik dramatis, *subtitle* huruf kapital, *zoom* wajah penuh emosi, dan satu kalimat sakti yang cukup kuat untuk memicu perang komentar selama tiga hari tiga malam.

Para kandidat yang terlalu panjang menjelaskan kebijakan fiskal akan kalah cepat dengan kandidat yang mampu berkata: “Saya bersama rakyat!” dengan ekspresi marah sambil menunjuk kamera, dan menggebrak-gebrak meja.

Di era itu, kompleksitas dianggap musuh utama popularitas. Karena semakin rumit penjelasan seorang calon pemimpin, semakin kecil kemungkinan videonya ditonton sampai selesai. Maka lahirlah generasi baru politisi: politisi algoritmik.

Mereka bukan lagi manusia politik dalam pengertian klasik. Mereka adalah produk optimalisasi digital.

Tim sukses modern tidak lagi bertanya: “Apa visi kebangsaan kandidat kita?” Mereka bertanya: “*Thumbnail* wajah marah atau sedih yang CTR-nya lebih tinggi?”

Negara perlahan memasuki fase ketika kualitas demokrasi ditentukan oleh performa media sosial. Jumlah *likes* dianggap mendekati legitimasi moral. Jumlah *followers* dianggap mendekati dukungan ideologis. Dan *trending topic* sering kali lebih dipercaya dibanding data statistik resmi.

Fenomena ini menyebabkan perubahan besar dalam perilaku publik. Rakyat mulai lebih hafal slogan dibanding substansi kebijakan. Mereka mungkin tidak tahu: isi APBN, arah reformasi agraria, atau strategi ketahanan energi

nasional, tetapi mereka hafal: *tagline* kampanye, jargon debat, dan potongan kalimat viral para elite politik. Bahkan pada titik tertentu, sebagian masyarakat mampu menghafal intonasi kemarahan kandidat lebih baik daripada isi undang-undang yang memengaruhi hidup mereka sendiri.

Seorang antropolog media tahun 2087 pernah menulis: “Indonesia adalah negara pertama yang berhasil mengubah demokrasi menjadi format *variety show* dengan sedikit unsur kenegaraan.”

Kalimat itu awalnya dianggap satire. Sampai kemudian arsip digital abad ke-21 dipelajari ulang oleh AI sejarah global. Dan ternyata kondisinya memang lebih aneh daripada parodi.

Debat publik yang dahulu dirancang sebagai ruang adu gagasan perlahan berubah menjadi lomba slogan nasional. Moderator televisi lebih sibuk menjaga tempo acara dibanding memperdalam substansi jawaban. Kandidat berlomba menghasilkan satu kalimat paling viral, karena mereka sadar sebagian besar rakyat tidak akan menonton debat penuh berdurasi dua jam. Yang dibutuhkan hanyalah: satu potongan pendek, satu ekspresi, dan satu ledakan emosi.

Politik akhirnya tunduk total kepada hukum *platform* digital. Algoritma media sosial tidak menyukai penjelasan panjang. Ia menyukai konflik. Ia menyukai kemarahan. Ia menyukai ejekan. Ia menyukai rasa tersinggung massal.

Dan elite politik dengan cepat belajar cara memberi makan algoritma itu. Maka lahirlah era ketika: kemarahan menjadi strategi komunikasi, kesederhanaan menjadi senjata populisme, dan kebisingan menjadi indikator elektabilitas.

Pada masa itu, rakyat Indonesia sebenarnya hidup di dua negara sekaligus. Negara pertama adalah negara nyata:

dengan harga pangan yang melambung, utang negara yang bejibun, krisis lapangan kerja, dan persoalan pendidikan tak kunjung selesai. Negara kedua adalah negara digital: tempat jutaan orang bertengkar setiap hari tentang potongan video yang bahkan sering mereka tonton tanpa konteks lengkap.

Ironisnya, negara digital jauh lebih ramai daripada negara nyata. Sebagian besar energi nasional habis di ruang komentar. Para *buzzer* menjadi pasukan tidak resmi demokrasi. *Podcast* berubah menjadi pengadilan opini. *Influencer* politik muncul lebih cepat dibanding peneliti kebijakan.

Dan untuk pertama kalinya dalam sejarah modern Indonesia, kemampuan berbicara mulai dianggap lebih penting daripada kemampuan bekerja diam-diam. Semakin keras seseorang berbicara di depan kamera, semakin besar peluangnya dianggap pemimpin. Sementara orang yang terlalu tenang dicurigai tidak punya *branding*.

Para ilmuwan politik abad ke-22 menyebut fenomena ini sebagai: *Rhetorical Capitalism* — sistem ketika kata-kata diproduksi massal seperti komoditas industri.

Indonesia tidak kekurangan pidato. Indonesia hanya kelebihan pengeras suara. Namun justru di tengah kebisingan itulah lahir satu komoditas paling berharga abad ke-21: viralitas.

Karena di era tersebut, viral lebih penting daripada benar. Dan omon-omon, pada akhirnya, menjadi energi terbarukan utama Republik.

ARSIP NASIONAL REPUBLIK RETORIKA

Arsip No. 002

BALIHO POLITIK NASIONAL

Kategori: Flora Demokrasi Visual

Periode Penggunaan: ±1998–2035

Status: Pernah Mendominasi Habitat Perkotaan

Lokasi Penemuan: Jalan raya, persimpangan, tiang listrik, area persawahan, dan lokasi strategis yang tidak meminta izin kepada estetika kota.

Keterangan Kurator

Baliho politik adalah media komunikasi raksasa yang digunakan untuk mengingatkan rakyat bahwa seseorang sedang ingin dipilih. Berbeda dengan buku yang harus dibaca, atau pidato yang harus didengar, baliho memiliki keunggulan unik: ia dapat menyampaikan ambisi politik tanpa memerlukan penjelasan apa pun. Cukup dengan: senyum optimistis, pakaian formal, slogan singkat, dan ukuran yang sangat besar. Maka pesan politik dianggap telah tersampaikan. Para ahli komunikasi menyebutnya sebagai bentuk paling efisien dari demokrasi visual. Para kritikus menyebutnya sebagai polusi dengan anggaran kampanye.

Catatan Sejarawan Digital (2126)

Penelitian terhadap jutaan arsip visual menunjukkan bahwa sebagian besar baliho politik Indonesia memiliki struktur yang hampir identik. Terdiri atas: foto tokoh berukuran besar; tatapan ke arah masa depan; senyum yang tidak menjelaskan apa pun; slogan yang terdengar penting; dan warna partai. Anehnya, pola tersebut tetap digunakan selama puluhan tahun dan terus dianggap efektif. Fenomena ini kemudian dikenal sebagai: Teori Reproduksi Wajah Demokratis. Yaitu keyakinan bahwa semakin sering rakyat melihat wajah seseorang, semakin besar kemungkinan mereka menganggapnya layak memimpin.

Hasil Penelitian Arkeologi Politik

Pada dekade 2020-an, populasi baliho meningkat sangat pesat. Dalam beberapa wilayah perkotaan, jumlah baliho politik tercatat lebih banyak

daripada: taman kota, perpustakaan umum, halte pejalan kaki, dan ruang diskusi warga. Para peneliti lingkungan bahkan sempat mengusulkan klasifikasi baru: *Billboardus Politicus*, sebagai spesies vegetasi urban yang berkembang menjelang musim pemilu.

Karakteristik Fisik

Sebagian besar artefak memiliki ciri-ciri berikut: ☒ Foto dengan pencahayaan studio. ☒ Jas atau pakaian resmi. ☒ Slogan optimistis. ☒ Gestur tangan yang ramah. ☒ Latar merah, biru, atau kombinasi warna partai. ☒ Kalimat yang mengandung kata: rakyat, perubahan, kemajuan, masa depan, Indonesia. Para ilmuwan belum menemukan hubungan langsung antara ukuran baliho dan kualitas kepemimpinan. Namun hubungan antara ukuran baliho dan besarnya anggaran kampanye terbukti sangat kuat.

Laporan Kondisi Artefak

Sebagian besar baliho ditemukan dalam keadaan rusak akibat: hujan, panas, angin, dan pergantian koalisi politik. Beberapa artefak berubah fungsi menjadi: penutup bangunan, atap darurat, alas warung, dan kandang ternak. Transformasi ini dianggap sebagai kontribusi nyata baliho terhadap ekonomi sirkular nasional.

Peringatan Museum

Pengunjung dilarang berdiri terlalu lama di depan artefak ini. Paparan berlebihan dapat menyebabkan gejala: optimisme mendadak, kepercayaan pada slogan, dan keinginan mencalonkan diri dalam pemilu berikutnya.



Kesimpulan Kurator

Banyak bangsa meninggalkan monumen batu. Sebagian meninggalkan istana. Sebagian lagi meninggalkan perpustakaan. Indonesia abad ke-21 meninggalkan sesuatu yang lebih sederhana: wajah-wajah besar yang tersenyum di pinggir jalan. Dan selama beberapa dekade, republik ini tampaknya percaya bahwa masa depan dapat dimulai dari sebuah baliho yang cukup besar.

BAB 2

MAKAN SIANG GRATIS

DAN TEORI PERUT NASIONAL

“Peradaban yang percaya semua masalah bisa diselesaikan dengan nasi, sebenarnya hanya menunda lapar yang lebih besar.”
— Sejarawan Digital, 2126

Pada awal abad ke-21, bangsa ini menemukan satu teori besar:

KALAU RAKYAT LAPAR, BERI DIA MAKAN.

Kalau masih komplek, kasih lagi.
Kalau masih komplek juga, tambah porsi nya.

Lahir lah teori:

Nasionalisme Karbohidrat.

Teorinya sederhana:

Perut kenyang = rakyat bahagia.

Rakyat bahagia = pemimpin dicintai.

Pemimpin dicintai = pemilu aman sentosa.

★ CATATAN KURATOR (2126)

Program makan siang gratis dianggap sebagai salah satu eksperimen sosial terbesar abad ke-21. Tujuannya mulia, tetapi eksekusinya sering kali diiringi pencitraan yang lebih besar daripada prinsipnya.

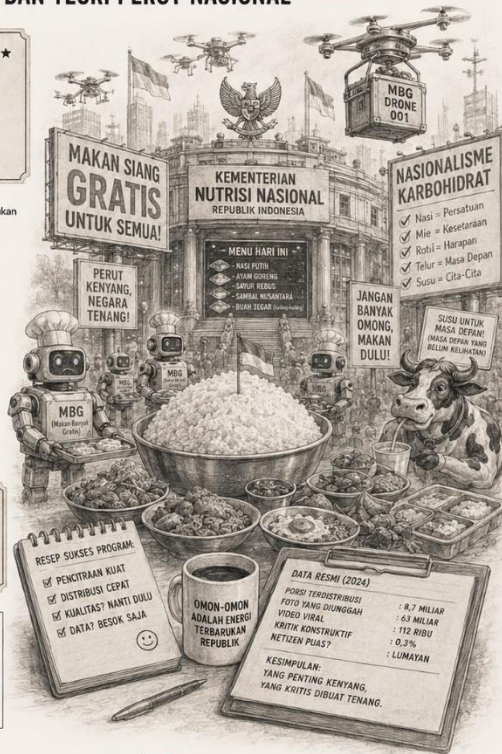
ARSIP NASIONAL REPUBLIK RETORIKA

ARSIP NO. 002

SLOGAN KAMPANYE 2024

“MAKAN SIANG GRATIS UNTUK SEMUA!”

Catatan AI: Semua belum tentu termasuk semua.



BAB 2

MAKAN BERGIZI GRATIS DAN TEORI PERUT NASIONAL

Peradaban yang Percaya Semua Masalah Bisa Diselesaikan dengan Nasi

Sejarah politik dunia pernah melahirkan banyak doktrin besar. Amerika Serikat memiliki *American Dream*. Prancis memiliki republik sekuler modern. Tiongkok memiliki sosialisme pasar. Eropa memiliki negara kesejahteraan. Dan, Indonesia abad ke-21 memiliki: makan bergizi gratis.

Bagi generasi masa depan, konsep ini terdengar sederhana. Terlalu sederhana, bahkan. Namun pada tahun-tahun penuh kecemasan ekonomi, ketimpangan sosial, dan kelelahan kolektif rakyat menghadapi harga kebutuhan pokok, gagasan tentang negara yang datang membawa sepiring nasi hangat memiliki kekuatan emosional yang luar biasa.

Program itu bukan sekadar kebijakan. Ia menjelma menjadi simbol. Simbol tentang perhatian negara. Simbol tentang harapan. Simbol tentang pemerintah yang ingin terlihat dekat dengan rakyat kecil. Dan seperti semua simbol besar dalam sejarah politik Indonesia, ia segera berubah menjadi: slogan nasional.

Di televisi, para elite berbicara tentang gizi. Di media sosial, rakyat berbicara tentang lauk. Di *podcast* politik, *influencer* mendadak menjadi ahli nutrisi nasional. Negara memasuki fase yang oleh ilmuwan sosial kemudian disebut: Nasionalisme Karbohidrat. Yaitu kondisi ketika nasi tidak lagi dipahami sekadar makanan pokok, melainkan fondasi emosional kebangsaan.

Dalam teori ini, stabilitas negara dipercaya berkaitan langsung dengan tingkat kekenyangan rakyat. Jika perut kenyang: rakyat tenang, demonstrasi berkurang, indeks optimisme naik, dan pemerintah memperoleh legitimasi moral berbasis sendok nasi.

Para ekonom bingung. Untuk pertama kalinya dalam sejarah dunia, APBN dibahas menggunakan istilah tambahan sambal. Sidang anggaran nasional menjadi sangat unik. Menteri keuangan berbicara mengenai: protein, distribusi telur, logistik ayam, harga cabai, dan rasio kecukupan gizi, sementara anggota parlemen berdebat serius tentang: “Apakah satu anak mendapat dua potong tempe atau satu?”

Di media sosial, perdebatan semakin liar. Pendukung pemerintah menganggap program makan gratis sebagai revolusi kesejahteraan terbesar sejak penemuan *rice cooker*. Kelompok oposisi menyebutnya populisme karbohidrat. Sementara rakyat biasa memiliki pertanyaan yang jauh lebih sederhana: “Menunya apa besok?”

Dan di situlah letak kejeniusan politiknya. Manifesto ekonomi terlalu rumit. Reformasi birokrasi terlalu abstrak. Transformasi industri terlalu teknokratis. Tetapi sepiring nasi? Semua orang langsung mengerti.

Politik modern akhirnya menemukan bentuk komunikasi paling efektif: makanan. Karena rakyat mungkin tidak membaca dokumen kebijakan setebal tiga ratus halaman. Namun mereka akan selalu memperhatikan isi kotak makan siang. Akibatnya, perlahan terjadi perubahan besar dalam budaya politik nasional. Rakyat mulai lebih percaya menu daripada manifesto.

Di berbagai daerah, survei elektabilitas tidak lagi hanya mengukur popularitas kandidat, tetapi juga mengukur persepsi publik terhadap: rasa ayam, tingkat kepedasan sambal, dan ketebalan telur dadar. Beberapa konsultan

politik bahkan mulai menyarankan: “Jangan terlalu banyak bicara geopolitik. Fokus saja pada lauk.”

Indonesia memasuki era ketika dapur lebih strategis daripada perpustakaan kebijakan. Universitas-universitas mulai membuka seminar tentang: ekonomi nutrisi elektoral, populisme pangan, dan diplomasi karbohidrat nasional.

Sementara itu, media televisi berlomba membuat program khusus: “Bedah Menu Bangsa”. Panel diskusi yang dahulu membahas demokrasi kini memperdebatkan: kandungan protein, jenis susu, dan apakah kerupuk termasuk indikator kemajuan nasional.

Ironisnya, sebagian besar rakyat justru merasa lebih diperhatikan dibanding era-era sebelumnya. Karena selama puluhan tahun, politik Indonesia terlalu sering berbicara tentang: pertumbuhan, investasi, hilirisasi, bonus demografi, dan transformasi digital, tanpa pernah benar-benar mampu menjelaskan bagaimana semua istilah itu terasa di meja makan rakyat kecil.

Makan bergizi gratis memotong seluruh kerumitan itu. Ia datang langsung ke perut. Dan dalam sejarah politik modern, tidak ada organ tubuh yang lebih mudah memenangkan pemilu selain perut.

Para pengamat asing kebingungan membaca fenomena Indonesia. Beberapa media internasional menyebutnya eksperimen kesejahteraan populis terbesar di Asia Tenggara. Sebagian akademisi menganggapnya bentuk baru kontrak sosial. Namun sebagian lainnya diam-diam mengakui: mereka iri karena tidak pernah menemukan slogan politik sederhana sekaligus sekuat itu. Sebab di banyak negara, rakyat masih dipaksa memahami jargon ekonomi yang rumit. Di Indonesia, negara cukup berkata: “Makan dulu.”

Dan jutaan orang merasa masa depan tampak sedikit lebih masuk akal. Namun sebagaimana seluruh proyek politik besar dalam sejarah republik, program itu akhirnya berkembang jauh melampaui fungsi awalnya. Ia berubah menjadi identitas politik.

Mereka yang mendukung program dianggap: pro-rakyat, nasionalis, dan berpihak pada wong cilik. Sementara mereka yang mengkritik dianggap: terlalu akademis, tidak membumi, atau lebih mencintai teori daripada nasi.

Diskusi publik menjadi semakin emosional. Data perlahan kalah oleh rasa lapar kolektif. Dan untuk pertama kalinya dalam sejarah Indonesia modern, kritik kebijakan fiskal dapat dianggap sebagai: serangan terhadap makan siang anak-anak.

Pada titik itu, politik telah menemukan bentuk tertingginya: emosi domestik. Bukan lagi ideologi. Bukan lagi konstitusi. Melainkan hubungan intim antara negara, nasi, dan harapan sederhana rakyat untuk hidup sedikit lebih layak esok hari.

Para filsuf politik abad ke-22 kemudian menyimpulkan: “Indonesia tidak pernah benar-benar diperintah oleh ideologi. Indonesia diperintah oleh kombinasi antara harapan, humor, dan karbohidrat”. Dan mungkin, untuk bangsa yang terlalu lama kenyang pidato namun lapar kenyataan, itu memang terdengar masuk akal.

ARSIP NASIONAL REPUBLIK RETORIKA

Arsip No. 003

MAKAN BERGIZI GRATIS

Status: Artefak Politik Nutrisi Nasional

Periode: Awal Abad ke-21 (2024–2030)

Kategori: Janji Publik Berkalori Tinggi

Kondisi: Sangat Populer, Sangat Diperdebatkan

Keterangan Kurator

Artefak ini merupakan salah satu simbol politik paling terkenal dalam sejarah Indonesia modern. Pada masanya, benda ini tidak berbentuk fisik. Ia berbentuk gagasan. Dan seperti semua gagasan besar dalam politik, ia hadir dalam dua versi sekaligus: Versi pendukung dan versi penentang. Pendukung melihatnya sebagai bentuk nyata kehadiran negara dalam kehidupan rakyat. Penentang melihatnya sebagai bentuk nyata kehadiran negara dalam anggaran. Akibatnya, selama bertahun-tahun bangsa Indonesia terlibat dalam perdebatan panjang mengenai satu pertanyaan sederhana: *"Apakah makan bergizi gratis merupakan kebijakan sosial, strategi pembangunan manusia, atau sekadar slogan yang sangat enak didengar?"* Sampai hari ini, dalam konteks buku ini berarti di tahun 2126, para sejarawan masih memperdebatkannya.

Catatan Sejarah

Menurut arsip digital yang tersimpan di Museum Retorika Nusantara, program ini pertama kali memperoleh perhatian nasional karena memiliki dua unsur yang sangat disukai masyarakat Indonesia: gratis dan makanan. Kombinasi keduanya menciptakan tingkat popularitas yang bahkan sulit disaingi oleh reformasi birokrasi, revisi regulasi, maupun pembahasan indikator makroekonomi. Banyak warga yang tidak memahami kebijakan fiskal. Tetapi hampir semua memahami arti kata: gratis.

Rekonstruksi Percakapan Publik (Tahun 2025)

Warga A: "Program ini bagus untuk anak-anak."

Warga B: "Anggarannya dari mana?"

Warga A: "Nanti dihitung."

Warga B: "Siapa yang menghitung?"

Warga A: "Yang penting anak-anak makan dulu."

Temuan Antropolog Digital

Penelitian tahun 2118 menemukan bahwa selama era tersebut, diskusi tentang makan bergizi gratis menghasilkan lebih banyak komentar media sosial dibanding diskusi tentang: reformasi pendidikan, reformasi

29

lapisan masyarakat: bahasa perut. Dan seperti diketahui oleh setiap peradaban sejak zaman kuno, manusia mungkin dapat hidup tanpa pidato panjang. Tetapi sangat sulit hidup tanpa makan bergizi gratis.

Arsip Nasional Republik Retorika Koleksi Permanen – Artefak Politik No. 003

"Ketika perdebatan fiskal akhirnya bertemu dengan nasi hangat."

BAB 3

NDASMU ETIKA

Runtuhnya Peradaban Kesopanan Politik

CATATAN
SEJARAWAN DIGITAL
(2126)

“
Kami menemukan
jutaan rekaman
pertengkar politik.

Kami tidak menemukan
satu pun yang
mengubah keadaan.

”
— Arsip Demokrasi 5.0

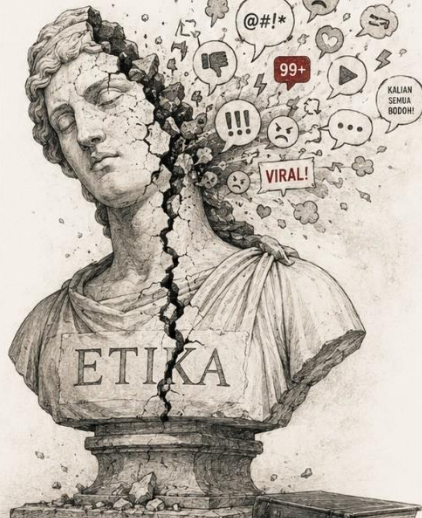
Pada awal abad ke-21,
etika masih diajarkan
sebagai mata pelajaran.

Namun dalam praktik politik,
ia lebih sering dijadikan
bahan ejekan.

Ketika perhatian menjadi mata uang,
kesopanan dianggap beban.

Ketika emosi menjadi senjata,
etika menjadi korban pertama.

Inilah kisah tentang
runtuhnya peradaban
kesopanan politik.



ARTEFAK POLITIK No. 003

ETIKA

STATUS:
PUNAH PADA ERA VIRAL
2020-2035

CATATAN KURATOR (2126)

Artefak ini dahulu
digunakan untuk
membedakan kritik
dan penghinaan.

Fungsinya berhenti
diketahui sekitar
tahun 2024.

ARSIP ZAMAN
KEGADUHAN
2000-2035

SEJARAH
BOLEH KUDA,
TAPI ETIKA
JANGAN.

BAB 3

NDASMU ETIKA

Runtuhnya Peradaban Kesopanan Politik

Setiap zaman memiliki kalimat yang mewakili watak peradabannya. Romawi kuno memiliki pidato filsuf. Revolusi Prancis memiliki semboyan kebebasan. Era modern memiliki deklarasi hak asasi manusia. Indonesia abad ke-21 memiliki: “Ndasmu etika”.

Kalimat itu pendek. Kasar. Emosional. Dan sangat viral. Banyak sejarawan politik masa depan percaya bahwa ucapan tersebut bukan sekadar ledakan emosi spontan. Ia adalah monumen linguistik. Simbol sempurna dari runtuhnya kesopanan politik nasional.

Pada masa itu, Indonesia sedang memasuki fase baru demokrasi digital: fase ketika kemarahan jauh lebih cepat menyebar dibanding penjelasan rasional. Media sosial telah mengubah bahasa politik menjadi arena kompetisi emosi. Orang yang paling tenang dianggap lemah. Orang yang paling kasar dianggap autentik. Dan orang yang paling viral dianggap paling jujur.

Di era itu, sopan santun mulai dicurigai sebagai pencitraan. Sebaliknya, kemarahan dipasarkan sebagai keberanian moral. Politisi modern memahami bahwa algoritma media sosial tidak menyukai kehati-hatian bahasa. Algoritma menyukai: konflik, nada tinggi, ekspresi marah, penghinaan, dan kemungkinan perang komentar selama minimal 48 jam.

Akibatnya, bahasa politik mengalami evolusi yang aneh. Pidato kenegaraan perlahan kehilangan nuansa diplomatis. Diskusi publik berubah menjadi adu sindiran.

Dan debat politik mulai menyerupai pertandingan antar-admin akun anonim.

Para elite politik saling menyerang menggunakan: meme, potongan video, sindiran personal, hingga metafora kepala. Semua itu dilakukan di depan publik yang menonton seperti penonton sinetron nasional. Rakyat menikmati pertengkaran elite sebagaimana mereka menikmati drama keluarga *prime time*.

Setiap ucapan kasar segera dipotong, diedit, diberi musik dramatis, lalu diunggah ulang ke seluruh *platform* digital. Dalam hitungan jam, sebuah kalimat dapat berubah menjadi: stiker WhatsApp, kaos sablon, *template* TikTok, hingga *merchandise* politik.

Indonesia memasuki fase ketika penghinaan memiliki nilai ekonomi. Setelah ucapan “Ndasmu Etika” viral, universitas-universitas membuka Program Studi Etika Kepala. Awalnya itu satire internet. Namun karena tingginya minat publik terhadap kajian budaya politik digital, beberapa kampus benar-benar membuka mata kuliah: komunikasi konflik, retorika populis, dan psikologi kemarahan media sosial.

Mahasiswa mempelajari bagaimana satu kalimat emosional mampu mengalahkan seratus halaman argumentasi akademik. Dan memang demikian kenyataannya. Pada awal abad ke-21, substansi mulai kalah cepat dibanding sensasi.

Rakyat mungkin tidak membaca: rancangan undang-undang, laporan audit negara, atau naskah kebijakan ekonomi, tetapi mereka hafal: nada marah, ekspresi wajah, dan urutan hinaan para tokoh politik. Demokrasi berubah menjadi industri klip pendek. Semakin kasar sebuah ucapan, semakin tinggi peluangnya masuk *trending topic*. Semakin

emosional sebuah debat, semakin besar pendapatan iklan *platform* digital.

Maka politik pun perlahan mengikuti logika industri hiburan. Para konsultan komunikasi mulai menyusun strategi berbasis viralitas konflik. Mereka tidak lagi bertanya: “Bagaimana menjelaskan kebijakan ini dengan baik?” Mereka bertanya: “Kalimat mana yang paling mungkin dijadikan meme?”

Di titik itulah peradaban politik Indonesia memasuki fase *absurd*. Bahasa tidak lagi dipakai untuk memperjelas gagasan. Bahasa dipakai untuk memenangkan perhatian. Dan perhatian publik adalah mata uang paling mahal abad ke-21. Akibatnya, pertengkaran elite berubah menjadi arsip budaya nasional.

Museum digital abad ke-22 menyimpan ribuan koleksi: video saling sindir antar-politikus, rekaman debat penuh teriakan, tangkapan layar perang komentar, hingga *podcast* politik yang isinya lebih panas daripada sidang parlemen. Para peneliti di abad ke-22 mempelajari semua itu dengan penuh kebingungan. Mereka sulit memahami bagaimana sebuah bangsa besar yang memiliki: ratusan universitas, jutaan sarjana, dan ribuan pakar kebijakan, justru lebih tertarik pada potongan video marah berdurasi sebelas detik.

Salah satu AI sejarah global bahkan pernah mengalami *error* setelah diminta menganalisis percakapan politik Indonesia tahun 2024. Sistem itu gagal membedakan: mana debat kenegaraan, mana *roasting* komedian, dan mana komentar warganet sepak bola. Laporan resmi AI tersebut berbunyi: “*Tingkat kebisingan emosional terlalu tinggi. Substansi sulit ditemukan.*”

Namun justru di tengah kekacauan bahasa itulah popularitas politik tumbuh subur. Karena rakyat yang lelah oleh formalitas elite mulai merasa bahwa kemarahan kasar terdengar lebih manusiawi dibanding pidato birokratis.

Mereka mungkin tidak setuju dengan isi ucapannya. Tetapi mereka merasa: “Akhirnya ada politisi yang bicara seperti orang warung kopi.” Dan politik modern sangat memahami kekuatan kesan autentik. Bahkan ketika autentik itu berarti: meledak-ledak, menyerang, atau mempermalukan lawan di depan publik.

Pada akhirnya, kesopanan politik dianggap tidak efisien dalam ekonomi perhatian digital. Terlalu halus tidak viral. Terlalu tenang tidak *trending*. Terlalu rasional tidak menghibur.

Indonesia lalu memasuki zaman ketika: kemarahan menjadi *branding*, ejekan menjadi strategi komunikasi, dan etika menjadi bahan lelucon nasional. Para filsuf abad ke-22 kemudian menyimpulkan: “Indonesia tidak kehilangan etika politik. Indonesia hanya mengubahnya menjadi konten.”

ARSIP NASIONAL REPUBLIK RETORIKA

Arsip No. 004

NDASMU ETIKA

Status: Artefak Keruntuhan Kesopanan Politik

Periode: Awal Abad ke-21 (± 2024)

Kategori: Ujaran Publik Berkekuatan Viral Tinggi

Tingkat Kelangkaan: Rendah (karena segera ditiru di mana-mana)

Keterangan Kurator

Artefak ini menandai salah satu momen penting dalam sejarah bahasa politik Indonesia. Sebelum periode ini, para politisi biasanya menyerang lawan menggunakan istilah yang relatif formal seperti: “kurang tepat,” “tidak sesuai fakta,” atau “perlu dikaji lebih lanjut.” Namun memasuki

era media sosial, bangsa Indonesia menemukan bahwa kalimat panjang semakin sulit bersaing dengan potongan video berdurasi delapan detik. Maka lahirlah bentuk komunikasi politik yang lebih ringkas, lebih emosional, dan jauh lebih viral. Salah satu spesimen paling terkenal adalah: "*Ndasmu Etika*".

Catatan Sejarah

Para peneliti bahasa politik abad ke-22 menganggap frasa ini sebagai titik balik penting dalam evolusi retorika nasional. Ia menunjukkan bahwa: kesabaran menurun, algoritma meningkat, dan kesopanan mulai kalah bersaing dengan *engagement*. Dalam hitungan jam setelah kemunculannya, frasa tersebut menyebar ke: media sosial, grup percakapan keluarga, *podcast* politik, warung kopi, ruang kuliah, hingga diskusi ilmiah yang seharusnya membahas hal lain. Sebagian masyarakat marah. Sebagian tertawa. Sebagian menjadikannya sebagai stiker.

Rekonstruksi Percakapan Publik (Tahun 2024)

Warga A: "Itu tidak etis."

Warga B: "*Ndasmu etika*."

Warga A: "Maksud saya secara prinsip demokrasi..."

Warga B: "Sudah viral belum?"

Warga A: "..."

Temuan Antropolog Digital

Penelitian Universitas Nusantara Virtual tahun 2119 menemukan bahwa masyarakat Indonesia pada masa tersebut memiliki kecenderungan unik: Semakin sederhana sebuah kalimat, semakin besar peluangnya menjadi fenomena nasional. Akibatnya, kualitas argumen sering kali kalah oleh kualitas potongan video. Fenomena ini kemudian diberi nama: *Hukum Kompresi Retorika Nasional*. Semakin pendek kalimat politik, semakin panjang umur viralnya.

Artefak Pendukung

Komentar Netizen (tahun 2024)

"Saya tidak tahu konteksnya, tapi saya sudah punya pendapat."

Catatan Akademik (tahun 2126)

"Pada periode tersebut, sebagian besar perdebatan publik tidak dimenangkan oleh argumentasi terbaik, melainkan oleh kutipan paling mudah dicetak di kaus."

Headline Media Digital (Rekonstruksi Arsip)

"Satu Kalimat Mengalahkan Seribu Halaman Kajian"

Analisis Museum

Para kurator meyakini bahwa artefak ini bukan sekadar ungkapan spontan. Ia merupakan simbol zaman. Sebuah era ketika: emosi bergerak lebih cepat daripada data, viralitas lebih kuat daripada substansi, dan algoritma menjadi editor tidak resmi percakapan nasional. Dalam konteks tersebut, "Ndasmu Etika" bukan hanya kalimat. Ia adalah dokumen sejarah. Dokumen yang menjelaskan bagaimana demokrasi digital mengubah debat publik menjadi pertandingan perhatian.



**ARSIP NASIONAL
REPUBLIK RETORIKA**

Arsip No.
004

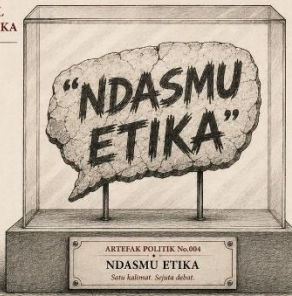
Status
Artefak Keruntuhan
Kepercayaan Politik

Periode
Awal Abad ke-21
(±2024)

Kategori
Ujuran Politik
Berkecukupan Viral Tinggi

Tingkat Kelangkaan
Rendah
(Kecuali segera ditiru
di masa-masa)





KETERANGAN KURATOR

Artefak ini menandai momen penting dalam sejarah budaya politik Indonesia. Sebuah ungkapan ringkas, emosional, dan sangat mudah viral yang menggeser kesadaran publik lebih cepat daripada argumentasi apa pun.

REKONSTRUKSI PERCAKAPAN PUBLIK (2024)

Warga A : Itu tidak etis.
Warga B : Ndasmu etika.
Warga A : Malah ngoceh
paling demokratis...

Warga B : Sudah viral belum?
Warga A : ...

TEMUAN ANTHROPOLOG DIGITAL

Semakin sederhana sebuah kalimat, semakin besar peluangnya menjadi fenomena nasional. Terutama jika kemudian diberi nama: **Hokum Kompresi Retorika Nasional**. Semakin pendek kalimat politik, semakin panjang umur viralitas.

ANALISIS MUSEUM

Tersaji banyak lebih cepat daripada data. Viralitas lebih kuat daripada substansi. Algoritma menjadi editor tidak resmi percakapan nasional. Dalam konteks tersebut, "Ndasmu Etika" bukan hanya kalimat. Ia adalah dokumen sejarah tentang bagaimana demokratisasi digital mengubah debat publik menjadi pertandingan perhatian.

ARSIP NASIONAL REPUBLIK RETORIKA
Kabinet Perencanaan - Arsip Politik No. 004
"Satu kalimat yang paling awal dalam argumentasi, mengalahkan kutipannya."

KOMENTAR NETIZEN (2024)

"Satu kalimat saja bisa jadi...
tapi yang salah siapa yang pendapat."

ARTIFAK PENDUKUNG

C. KEDIRAN AL. GENDONG (2126)
"Pada periode tersebut, sebagian besar perdebatan publik tidak dimenangkan oleh argumentasi terbaik, melainkan oleh kutipan paling mudah dicetak di kaus."

HEADLINE MEDIA DIGITAL (REKONSTRUKSI ARSIP)

Satu Kalimat Mengalahkan Seribu Halaman Kajian

KESIMPULAN KURATOR

Perubahan tidak selalu berarti kemajuan etika. Kadang ia hanya terbelah untuk mengesampingkannya.

Kesimpulan Kurator

Banyak bangsa memiliki monumen besar untuk mengenang masa lalunya. Indonesia memiliki sesuatu yang berbeda. Kadang yang dikenang bukan pidato kenegaraan. Bukan pula dokumen konstitusi. Melainkan satu kalimat pendek yang berhasil membuat seluruh negeri berhenti bekerja selama beberapa hari dan memilih berdebat di internet. Dan dari situlah para sejarawan di abad ke-22 memahami satu hal: Peradaban tidak selalu runtuh karena kekurangan etika. Kadang ia hanya terlalu sibuk memperdebatkannya.

Arsip Nasional Republik Retorika

Koleksi Permanen – Artefak Politik No. 004

"Pada akhirnya, yang paling abadi bukan argumennya, melainkan kutipannya."

BAB 4

REPUBLIK PODCAST

KETIKA MIKROFON LEBIH BERKUASA
DARIPADA KONSTITUSI

CATATAN
SEJARAWAN DIGITAL
(2126)

“
Pada era ketika
siaran lebih dipercaya
daripada data,
mikrofon menjadi
simbol kebenaran baru.
”

— Arsip Demokrasi 5.0

Podcast politik tumbuh subur
di awal abad ke-21.

Tanpa sensor, tanpa redaksi,
tanpa tanggung jawab.

Hanya opini.
Dibungkus percaya diri.
Disiarkan setiap hari.

Dan lama-lama,
opini dianggap lebih jujur
daripada data.

Di sinilah mikrofon
menggeser konstitusi.



ARTEFAK POLITIK No. 004

MIKROFON

STATUS:
MENGESER ASAL-USUL
KEBENARAN
2020-2035

CATATAN KURATOR (2126)

Mikrofon ini dahulu
menjadi jembatan dialog.
Namun kemudian berubah
menjadi panggung dominasi.
Digunakan luas pada era
ketika bicara lebih mudah
daripada memahami.
Fungsinya untuk mencari
kebenaran tidak lagi
diketahui sejak 2025.

ASAL: STUDIO PODCAST 2023
BAHAN: LOGAM, EGO, OPINI
UKURAN: BISA MEMBENGKAK
SESUAI KEYAKINAN
KOLEKSI: MUSEUM DIGITAL 2126
KOLEKSI PERTENGAHAN POLITIK
INDONESIA 2000-2035

“ PADA ERA ITU, SESEORANG DIANGGAP INTELEKTUAL
JIKA MAMPU BERBICARA SELAMA TIGA JAM TANPA DATA. ”

— Arsip Digital Demokrasi Indonesia, 2126

BAB 4

REPUBLIK *PODCAST*

Ketika Mikrofon Lebih Berkuasa daripada Konstitusi

Pada awal abad ke-21, Indonesia menemukan bentuk baru demokrasi. Bukan demokrasi parlementer. Bukan demokrasi liberal. Bukan pula demokrasi deliberatif sebagaimana diajarkan di kampus-kampus ilmu politik. Indonesia memasuki era: *Demokrasi Podcastik*. Yaitu sistem sosial ketika arah opini publik lebih banyak ditentukan oleh studio berlampu neon, mikrofon mahal, dan *thumbnail* YouTube dengan wajah terkejut.

Di masa itu, hampir semua persoalan nasional dapat dibahas dalam format yang sama: duduk santai, minum kopi, memakai *headphone*, lalu berbicara selama tiga jam tanpa kesimpulan. *Podcast* menjadi institusi politik baru republik. Ia menggantikan: seminar ilmiah, forum akademik, diskusi kampus, bahkan sebagian fungsi media massa. Karena bagi masyarakat digital saat itu, membaca jurnal terasa terlalu melelahkan. Sementara mendengar orang bicara sambil bercanda terasa jauh lebih manusiawi. Maka lahirlah generasi baru intelektual nasional: *host podcast*. Mereka bukan dipilih oleh universitas. Bukan pula oleh lembaga riset. Mereka dipilih oleh algoritma. Semakin tinggi jumlah *views*, semakin besar legitimasi intelektual seseorang.

Pada era itu, seseorang dianggap intelektual jika mampu berbicara selama tiga jam tanpa data. Kemampuan utama bukan lagi: akurasi, metodologi, atau kedalaman analisis, melainkan stamina berbicara dan kemampuan menjaga percakapan tetap viral. Orang yang mampu menyebut: “Nah ini yang menarik...” sebanyak empat puluh kali dalam satu episode dianggap pemikir publik kelas nasional.

Podcast politik berkembang sangat cepat karena memenuhi kebutuhan utama rakyat Indonesia modern: ingin merasa memahami persoalan rumit tanpa harus membaca terlalu banyak. Masyarakat ingin membahas: geopolitik, ekonomi global, konstitusi, krisis energi, bahkan konflik internasional, tetapi dalam suasana yang tetap terasa seperti nongkrong warung kopi. Dan *podcast* menyediakan itu.

Negara akhirnya mengalami fenomena yang belum pernah tercatat dalam teori politik klasik: mikrofon menjadi lebih berkuasa daripada konstitusi. Banyak keputusan publik mulai dipengaruhi bukan oleh sidang resmi negara, melainkan oleh percakapan viral berdurasi panjang. Pernyataan yang diucapkan di *podcast* sering lebih menentukan arah opini nasional dibanding dokumen pemerintah setebal ratusan halaman. Karena dokumen resmi jarang ditonton. Sedangkan potongan *podcast* dapat menyebar ke seluruh negeri dalam waktu beberapa menit. Potongan itu biasanya memiliki formula sederhana: satu kalimat provokatif, satu ekspresi serius, musik tegang, dan teks kapital warna merah.

Demokrasi Indonesia perlahan berubah menjadi demokrasi berbasis *thumbnail* YouTube. Semakin dramatis *thumbnail*-nya, semakin dianggap penting isi pembahasannya. Akibatnya, wajah manusia abad ke-21 mulai mengalami transformasi politik. Ekspresi terkejut menjadi simbol intelektual. Mulut terbuka dianggap tanda urgensi nasional. Dan lingkaran merah di *thumbnail* menjadi alat analisis geopolitik.

Para ilmuwan komunikasi masa depan menyebut fenomena ini: Thumbnailisasi Demokrasi. Yaitu kondisi ketika rakyat menilai kualitas diskusi berdasarkan desain gambar sampul video. Jika *thumbnail* terlalu tenang, rakyat menganggap isinya membosankan. Karena dalam ekonomi perhatian digital, ketenangan tidak laku.

Maka seluruh pembahasan politik harus tampak: darurat, mengejutkan, terbongkar, atau mengguncang dunia. Akibatnya, lahirlah fenomena narasumber dadakan. Pada masa itu, seseorang dapat berubah menjadi pakar nasional hanya karena: satu video viral, satu *thread* media sosial, atau satu keberanian berbicara percaya diri di depan kamera.

Tidak penting apakah ia benar-benar memahami topik tersebut. Yang penting: terlihat meyakinkan. Maka muncullah manusia-manusia ajaib yang pagi hari membahas: konflik Timur Tengah, siang hari menjelaskan: ekonomi makro, malam hari mengulas: kesehatan mental, spiritualitas, strategi perang, dan nutrisi anak sekolah.

Semua dalam satu kanal YouTube. Indonesia memasuki era: pakar segala bidang. Mereka hadir di mana-mana. Hari ini menjadi analis politik. Besok menjadi ahli pertanian. Lusa menjadi pakar konstitusi internasional. Dan anehnya, publik tetap percaya.

Karena di era itu, kepercayaan publik tidak lagi dibangun oleh kredibilitas akademik. Ia dibangun oleh: kepercayaan diri, pencahayaan studio, kualitas kamera, dan jumlah *subscriber*.

Universitas mulai kehilangan monopoli pengetahuan. Kini rakyat lebih percaya pada seseorang yang berkata: “Gue punya teori sendiri nih...” dibanding profesor yang membawa data statistik. Bahkan sebagian akademisi mulai menyesuaikan diri. Mereka sadar bahwa jurnal ilmiah tidak akan pernah mengalahkan algoritma video pendek. Maka banyak dosen perlahan berubah menjadi *content creator*.

Kuliah berubah menjadi konten. Analisis berubah menjadi klip. Ilmu pengetahuan berubah menjadi *personal branding*. Di titik itu, batas antara pendidikan, hiburan, dan propaganda menjadi sangat tipis.

Podcast tidak lagi sekadar media. Ia menjadi ekosistem politik nasional. Partai politik mulai mengirim kadernya ke studio *podcast* seperti mengirim diplomat ke konferensi internasional. Karena mereka tahu: siapa yang menguasai percakapan digital, menguasai persepsi publik.

Dan dalam demokrasi modern, persepsi sering kali lebih kuat daripada kenyataan. Pada masa itu, rakyat Indonesia hidup dalam banjir opini tanpa henti. Semua orang berbicara. Semua orang merekam. Semua orang mengomentari semua hal.

Tetapi semakin banyak suara muncul, semakin sulit menemukan pengetahuan yang benar-benar tenang. Republik berubah menjadi ruang obrolan raksasa. Tidak ada yang benar-benar diam. Tidak ada yang benar-benar selesai mendengar. Karena setiap orang menunggu giliran berbicara. Para filsuf abad ke-22 kemudian menyimpulkan: “Indonesia tidak kekurangan pakar. Indonesia hanya terlalu banyak mikrofon.”

ARSIP NASIONAL REPUBLIK RETORIKA

Arsip No. 005

PODCAST POLITIK

Kategori: Teknologi Produksi Opini Modern

Periode Penggunaan: ±2015–2035

Status: Pernah Dianggap Lebih Kredibel daripada Data

Lokasi Penemuan: Studio siaran digital, kanal video daring, ruang tamu rumah elite, dan berbagai tempat yang memiliki mikrofon serta koneksi internet.

Keterangan Kurator

Artefak ini merupakan salah satu inovasi politik paling berpengaruh pada awal abad ke-21. Berbeda dengan pidato resmi yang memiliki batas waktu dan tata acara, podcast politik memungkinkan seseorang berbicara selama berjam-jam tanpa gangguan fakta yang berlebihan.

Pada masa itu, masyarakat mulai mengalami kelelahan terhadap konferensi pers formal, laporan kebijakan yang panjang, dan dokumen pemerintahan yang sulit dipahami. Sebagai gantinya, mereka beralih kepada percakapan santai yang direkam menggunakan mikrofon berkualitas tinggi dan diterangi lampu studio yang hangat. Podcast kemudian berkembang menjadi arena baru produksi kebenaran publik. Dalam ruang tersebut, seorang pembawa acara dapat berbicara mengenai ekonomi, geopolitik, pertahanan, sejarah, kesehatan, agama, energi, teknologi, psikologi, dan masa depan peradaban dalam satu episode yang sama. Tidak ada kewajiban untuk menjadi ahli. Cukup terdengar meyakinkan.

Catatan Sejarah Digital (2126)

Analisis terhadap 42 juta jam rekaman *podcast* Indonesia periode 2020–2035 menunjukkan bahwa rata-rata durasi kepercayaan publik terhadap suatu pernyataan meningkat drastis ketika pernyataan tersebut diucapkan menggunakan mikrofon profesional. Fenomena ini kemudian dikenal sebagai: Efek Studio Akustik. Yaitu kecenderungan manusia untuk menganggap sebuah pendapat lebih valid apabila disampaikan di ruangan dengan pencahayaan redup, meja kayu, dan secangkir kopi di dekat mikrofon.

Rekonstruksi Percakapan Publik (tahun 2028)

Host: "Menurut Anda bagaimana kondisi ekonomi nasional?"

Narasumber: "Saya punya teori menarik."

Host: "Apakah berdasarkan data?"

Narasumber: "Tidak."

Host: "Menarik sekali. Kita lanjut."

Temuan Antropolog Digital

Penelitian tahun 2122 menemukan bahwa sebagian besar konflik politik Indonesia pada awal abad ke-21 mengikuti pola yang hampir identik: Seseorang berbicara di *podcast*. Potongan video berdurasi 30 detik menjadi viral. Media memberitakan potongan tersebut. Netizen bertengkar selama tiga hari. *Podcast* berikutnya dibuat untuk menjelaskan *podcast* sebelumnya. Siklus ini berulang tanpa batas dan kemudian dikenal sebagai: Teori Ekonomi Kontroversi Berkelanjutan.

Yaitu sistem komunikasi publik di mana penjelasan terhadap sebuah pernyataan menghasilkan perhatian yang lebih besar daripada pernyataan itu sendiri.

Artefak Pendukung

Mug Studio *Podcast*, sekitar tahun 2027. Tulisan pada benda: "*Trust Me, I'm an Expert.*" Meskipun penelitian arsip menunjukkan tidak selalu ada hubungan langsung antara tulisan tersebut dan kondisi sebenarnya.

Thumbnail Politik Digital, sekitar tahun 2029

Judul yang ditemukan: "FAKTA MENGEJUTKAN YANG TIDAK AKAN DIBERITAHUKAN MEDIA!" Setelah diperiksa oleh peneliti tahun 2126, fakta yang dimaksud ternyata telah diberitakan oleh hampir seluruh media nasional selama dua minggu.

Hasil Penelitian Arkeologi Politik

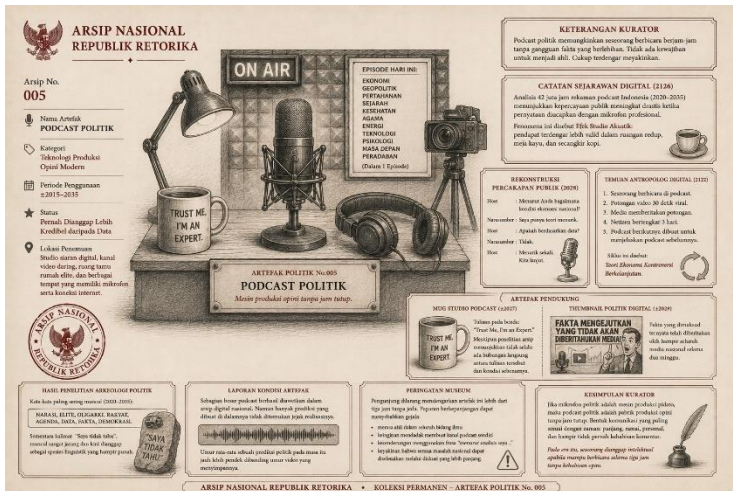
Para peneliti menemukan bahwa kata-kata yang paling sering muncul dalam *podcast* politik Indonesia periode 2020–2035 adalah: narasi, elite, oligarki, rakyat, agenda, data, fakta, demokrasi. Sementara kalimat: "Saya tidak tahu" muncul sangat jarang dan kini dianggap sebagai spesies linguistik yang hampir punah.

Laporan Kondisi Artefak

Sebagian besar *podcast* berhasil diawetkan dalam arsip digital nasional. Namun banyak prediksi yang dibuat di dalamnya tidak ditemukan jejak realisasinya. Para ilmuwan menyimpulkan bahwa umur rata-rata sebuah prediksi politik pada masa itu jauh lebih pendek dibanding umur video yang menyimpannya.

Peringatan Museum

Pengunjung dilarang mendengarkan artefak ini lebih dari tiga jam tanpa jeda. Paparan berkepanjangan dapat menyebabkan gejala: merasa ahli dalam seluruh bidang ilmu, keinginan mendadak membuat kanal *podcast* sendiri, kecenderungan menggunakan frasa "*menurut analisis saya...*", dan keyakinan bahwa semua masalah nasional dapat diselesaikan melalui diskusi yang lebih panjang.



Kesimpulan Kurator

Jika mikrofon politik adalah mesin produksi pidato, maka *podcast* politik adalah pabrik produksi opini tanpa jam tutup. Di sinilah republik abad ke-21 menemukan bentuk komunikasi yang paling sesuai dengan zamannya: panjang, ramai, personal, dan hampir tidak pernah kehabisan komentar. Sebagian bangsa meninggalkan perpustakaan. Sebagian meninggalkan monumen. Indonesia meninggalkan jutaan jam percakapan yang direkam dengan kualitas audio sangat baik, tetapi dengan tingkat kepastian yang sangat bervariasi.

Arsip Nasional Republik Retorika Koleksi Permanen – Artefak Politik No. 005

"Pada era itu, seseorang dianggap intelektual apabila mampu berbicara selama tiga jam tanpa kehabisan opini."

★ BAB 5 ★

NETIZEN: SUKU TERBESAR INDONESIA

Bangsa yang Menyelesaikan Segala Sesuatu
Lewat Komentar

Pada awal abad ke-21, Indonesia memiliki ratusan suku bangsa.
Ada Jawa, Sunda, Batak, Minangkabau, Bugis, Dayak.

Namun di atas seluruh identitas itu, lahiriah satu kelompok baru yang jauh lebih besar, lebih aktif, dan lebih berisik dibanding semuanya: netizen.

Mereka tidak memiliki wilayah adat. Tidak memiliki bahasa daerah resmi. Tidak memiliki rumah tradisional.

Tetapi mereka memiliki:

- ☑ akun media sosial,
- ☑ koneksi internet,
- ☑ dan opini tentang segala hal.

Netizen segera berkembang menjadi suku terbesar republik. Jumlahnya miliaran komentar. Wilayah kekuasaannya meliputi seluruh platform digital. Dan ritual utamanya adalah: berdebat tanpa akhir.

Para antropolog digital abad ke-22 menyebut fenomena ini sebagai: **Peradaban Komentar Permanen**.

Yaitu kondisi ketika manusia modern tidak lagi sekadar hidup di dunia nyata, melainkan hidup di kolom komentar.

Pada masa itu, hampir semua persoalan nasional diselesaikan dengan cara yang sama: marah di internet, membuat thread, menyerang lawan, lalu tidur. Besok paginya, siklus dimulai lagi.

★ CATATAN SEJARAWAN DIGITAL (2126) ★

“
Netizen adalah suku tanpa tanah, tetapi dengan kekuasaan terbesar. Mereka tidak memerintah negara, tetapi mampu mengguncangnya.”

—Arsip Demokrasi 5.0

★
**ARSIP NASIONAL
REPUBLIK RETORIKA**
ARSIP NO. 005
KLASIFIKASI: PERADABAN DIGITAL
PERIODE: 2000–2035



BAB 5

NETIZEN: SUKU TERBESAR INDONESIA

Bangsa yang Menyelesaikan Segala Sesuatu Lewat Komentar

Pada awal abad ke-21, Indonesia memiliki ratusan suku bangsa. Ada Jawa. Ada Sunda. Ada Batak. Ada Minangkabau. Ada Bugis. Ada Dayak. Namun di atas seluruh identitas itu, lahirlah satu kelompok baru yang jauh lebih besar, lebih aktif, dan lebih berisik dibanding semuanya: netizen.

Mereka tidak memiliki wilayah adat. Tidak memiliki bahasa daerah resmi. Tidak memiliki rumah tradisional. Tetapi mereka memiliki: akun media sosial, koneksi internet, dan opini tentang segala hal. Netizen segera berkembang menjadi suku terbesar republik. Jumlahnya miliaran komentar. Wilayah kekuasaannya meliputi seluruh *platform* digital. Dan ritual utamanya adalah: berdebat tanpa akhir.

Para antropolog digital abad ke-22 menyebut fenomena ini sebagai: Peradaban Komentar Permanen. Yaitu kondisi ketika manusia modern tidak lagi sekadar hidup di dunia nyata, melainkan hidup di kolom komentar. Pada masa itu, hampir semua persoalan nasional diselesaikan dengan cara yang sama: marah di internet, membuat *thread*, menyerang lawan, lalu tidur. Besok paginya, siklus dimulai lagi.

Indonesia memasuki era ketika opini publik bergerak lebih cepat dibanding fakta. Satu video berdurasi delapan detik dapat memicu: perang politik, kerusuhan digital, pemboikotan nasional, hingga investigasi televisi *prime time*. Dan semua itu sering terjadi sebelum siapa pun benar-benar tahu konteks aslinya.

Media sosial menciptakan bentuk baru nasionalisme: nasionalisme berbasis kolom komentar. Rakyat tidak lagi menunjukkan cinta tanah air melalui: kerja sosial, gotong royong, atau diskusi warga, melainkan melalui: CAPS LOCK, emoji marah, dan ancaman *unfollow* massal.

Semakin emosional komentar seseorang, semakin dianggap patriotik. Pada masa itu, membela tokoh politik favorit menyerupai membela klub sepak bola. Pendukung saling menyerang menggunakan: meme, potongan video, screenshot lama, dan tuduhan *buzzer*.

Istilah *buzzer* menjadi salah satu spesies politik paling penting abad ke-21. Tidak ada yang benar-benar tahu siapa mereka. Sebagian menganggap *buzzer* adalah: pasukan propaganda digital, operator opini, tentara algoritma, atau makhluk malam yang hidup dari *engagement*.

Namun keberadaan mereka terasa di mana-mana. Jika ada isu nasional: *buzzer* muncul. Jika ada kritik terhadap pemerintah: *buzzer* aktif. Jika ada kebijakan kontroversial: *timeline* berubah menjadi medan perang.

Mereka bekerja dengan prinsip sederhana: “Jika kenyataan tidak menguntungkan, serang percakapannya.” Akibatnya, ruang publik Indonesia perlahan berubah menjadi arena kebisingan tanpa henti. Semua orang bicara. Semua orang menyerang. Semua orang merasa paling benar. Tetapi hampir tidak ada yang benar-benar mendengar.

Pada titik tertentu, perang tagar menjadi cabang olahraga nasional tidak resmi. Setiap kelompok politik memiliki: *hashtag* sendiri, slogan sendiri, dan musuh digital sendiri. Tagar tidak lagi dipakai untuk mencari informasi. Ia dipakai untuk: mengukur kekuatan massa, membentuk persepsi, dan menunjukkan loyalitas politik.

Jika sebuah tagar berhasil *trending*, pendukung merasa menang. Tidak peduli apakah kebijakannya berhasil atau tidak. Karena dalam demokrasi digital saat itu: persepsi sering lebih penting daripada realitas. Para politisi memahami itu dengan sangat baik. Mereka mulai membangun pasukan media sosial seperti membangun unit tempur. Tim kampanye tidak lagi hanya berisi: ahli strategi politik, konsultan hukum, atau ekonom, melainkan: editor meme, admin akun anonim, pemburu *engagement*, dan analis *trending topic*.

Negara memasuki fase ketika stabilitas politik kadang bergantung pada suasana *timeline*. Sementara itu, budaya *cancel* mulai berkembang cepat. Masyarakat digital menemukan cara baru menghukum seseorang: pengadilan viral. Tidak diperlukan: hakim, pengadilan, ataupun proses pembuktian panjang. Cukup: satu video, satu potongan ucapan, dan satu kemarahan massal. Maka reputasi seseorang dapat runtuh dalam hitungan jam.

Pada era itu, manusia hidup dalam ketakutan baru: takut dipotong konteks. Karena siapa pun bisa menjadi: meme, bahan hinaan, atau musuh nasional digital, hanya karena satu kalimat yang viral di waktu yang salah. Ironisnya, semua pihak merasa menjadi korban. Pemerintah merasa diserang netizen. Netizen merasa dibohongi pemerintah. Pendukung oposisi merasa dibungkam. Pendukung pemerintah merasa difitnah.

Dan platform media sosial diam-diam memperoleh keuntungan dari semuanya. Karena semakin besar konflik, semakin lama orang menatap layar. Semakin lama orang menatap layar, semakin besar keuntungan iklan. Maka kemarahan publik perlahan berubah menjadi komoditas ekonomi.

Perusahaan teknologi global memanen perhatian rakyat Indonesia seperti tambang digital tak berujung. Dan

rakyat, tanpa sadar, bekerja sukarela sebagai pekerja emosi internet. Mereka bangun tidur lalu: memeriksa notifikasi, mencari musuh politik hari itu, bertengkar, membuat komentar, lalu mengulanginya lagi besok.

Manusia akhirnya berevolusi menjadi: warganet permanen. Batas antara kehidupan nyata dan kehidupan digital mulai runtuh. Makan sambil *scrolling*. Rapat sambil debat *online*. Liburan sambil perang komentar. Sebagian orang bahkan lebih mengenal avatar lawan politik dibanding tetangga rumah sendiri.

Para psikolog sosial abad ke-22 menyimpulkan bahwa masyarakat Indonesia pada era tersebut hidup dalam kondisi: kelelahan emosional kolektif. Tetapi anehnya, mereka tidak bisa berhenti. Karena media sosial telah menjadi candu politik nasional. Ia memberi: kemarahan instan, validasi cepat, rasa memiliki kelompok, dan ilusi partisipasi demokrasi.

Meskipun sebagian besar aktivitas itu tidak pernah benar-benar menyelesaikan persoalan nyata. Namun ada satu teori sejarah yang paling terkenal tentang era tersebut. Teori itu pertama kali muncul dalam jurnal futuristik tahun 2118 dan kemudian menjadi bahan perdebatan akademik internasional.

Bunyiya: *“Perang saudara Indonesia berhasil dihindari karena seluruh energi konflik sudah habis dipakai di Twitter.”* Dan semakin banyak arsip digital dipelajari, semakin sulit membantah teori itu. Karena bangsa Indonesia memang tampak lebih sibuk bertengkar di internet daripada turun ke jalan. Republik ini tidak pernah kehabisan kemarahan. Ia hanya mengubah kemarahan menjadi komentar.

Pada akhirnya, para filsuf abad ke-22 menyimpulkan: “Indonesia bukan negara berkembang. Indonesia adalah forum diskusi raksasa dengan sedikit unsur kenegaraan.”

ARSIP NASIONAL REPUBLIK RETORIKA

Arsip No. 006

BUZZER POLITIK

Kategori: Satwa Digital Demokrasi

Periode Penggunaan: ±2014–2035

Status: Sangat Aktif pada Musim Pemilu

Tingkat Kelangkaan: Tidak Pernah Terancam Punah

Lokasi Penemuan: Media sosial, kolom komentar, grup percakapan, dan seluruh wilayah internet yang memiliki koneksi data.

Keterangan Kurator

Artefak ini bukan benda. Ia merupakan organisme sosial digital yang berkembang pesat pada awal abad ke-21. Para peneliti masih memperdebatkan apakah *buzzer* termasuk profesi, fenomena budaya, strategi komunikasi politik, atau bentuk kehidupan internet yang berhasil berevolusi lebih cepat daripada regulasi negara. Secara umum, *buzzer* berfungsi untuk memperkuat pesan tertentu melalui pengulangan masif.

Dalam habitat aslinya, satu *buzzer* dapat menghasilkan ratusan unggahan per hari. Dalam kondisi tertentu, satu opini dapat muncul secara serentak di ribuan akun yang tampak berbeda tetapi menggunakan kalimat yang sangat mirip. Fenomena ini sempat membuat sebagian warga percaya bahwa seluruh bangsa tiba-tiba memiliki pendapat yang sama pada waktu yang sama. Belakangan diketahui bahwa kenyataannya sedikit lebih rumit.

Catatan Sejarawan Digital (tahun 2126)

Analisis terhadap arsip media sosial periode 2019–2035 menemukan bahwa sebagian besar konflik politik nasional mengikuti pola yang hampir identik: Seseorang mengunggah pendapat. *Buzzer* datang. Lawan *buzzer* datang. Semua pihak menuduh pihak lain sebagai *buzzer*. Tidak ada lagi yang mengingat topik awal perdebatan.

Fenomena ini kemudian dikenal sebagai: *Siklus Abadi Komentar Nasional*. Yaitu kondisi ketika diskusi publik bergerak semakin jauh dari masalah yang dibahas dan semakin dekat kepada identitas para peserta diskusi.

Rekonstruksi Percakapan Publik (tahun 2027)

Warga A: "Saya ingin membahas kebijakan ini."

Akun Anonim: "Berapa dibayar?"

Warga A: "Saya tidak dibayar."

Akun Anonim: "Itu yang dibayar biasanya bilang."

Warga A: "..."

Temuan Antropolog Digital

Penelitian Universitas Virtual Nusantara tahun 2121 menemukan bahwa masyarakat Indonesia pada awal abad ke-21 memiliki kemampuan luar biasa untuk mengidentifikasi *buzzer* pada semua orang kecuali kelompoknya sendiri. Fenomena tersebut diberi nama: *Efek Cermin Elektoral*. Yaitu keyakinan bahwa: Pendukung saya = warga kritis. Pendukung lawan = *buzzer*. Penelitian lanjutan gagal menemukan pengecualian yang signifikan.

Artefak Pendukung

Tangkapan Layar Media Sosial (tahun 2025)

Komentar yang ditemukan: "Saya netral, tapi..." Para peneliti mencatat bahwa setelah kalimat tersebut biasanya muncul pendapat yang sama sekali tidak netral.

Koleksi Hastag Politik

Ditemukan ribuan variasi: #Lanjutkan, #GantiSemua, #RakyatBersamaKami, #SelamatkanNegeri, #IndonesiaBangkit. Sebagian besar digunakan oleh kelompok yang saling bertentangan.

Hasil Penelitian Arkeologi Politik

Kajian terhadap miliaran komentar digital menemukan bahwa kata-kata yang paling sering digunakan oleh *buzzer* politik adalah: ☒ Narasi ☒ Framing ☒ Agenda ☒ Elite ☒ Oligarki ☒ Hoaks

☑ Rakyat. Sedangkan kalimat: "Mungkin saya salah." ditemukan sangat jarang dan kini dikategorikan sebagai spesies linguistik yang hampir punah.

Laporan Kondisi Artefak

Artefak ini tidak dapat dimusnahkan. Beberapa kali *platform* media sosial mencoba membatasi penyebarannya. Namun setiap kali satu akun menghilang, tiga akun baru muncul menggantikannya. Para ilmuwan digital menyimpulkan bahwa *buzzer* memiliki kemampuan reproduksi yang jauh lebih tinggi daripada argumentasi rasional.

Peringatan Museum

Pengunjung dilarang berinteraksi langsung dengan artefak ini. Paparan berkepanjangan dapat menyebabkan gejala: keinginan membalas semua komentar, membaca notifikasi setiap tiga menit, kehilangan konteks diskusi, merasa sedang menyelamatkan negara melalui kolom komentar.

Kesimpulan Kurator

Jika mikrofon politik adalah mesin produksi pidato, dan podcast politik adalah pabrik produksi opini, maka *buzzer* politik adalah sistem distribusinya. Mereka mengalirkan narasi ke seluruh ruang digital republik. Sebagian bangsa membangun jalan raya. Sebagian membangun rel kereta. Indonesia abad ke-21 membangun sesuatu yang lebih kompleks: jalur lalu lintas emosi nasional. Dan sebagian besar jalur itu dijaga oleh *buzzer*.

Arsip Nasional Republik Retorika

Koleksi Permanen – Artefak Politik No. 006

"Pada era itu, kebenaran tidak selalu ditentukan oleh siapa yang benar. Kadang ditentukan oleh siapa yang lebih dulu memenuhi linimasa."

BAB 6

KEMENTERIAN PENCITRAAN

REPUBLIK INDONESIA

Negara yang Mengukur Kemajuan
dari Drone dan Baliho

Pada awal abad ke-21,
kamera menjadi alat negara
paling penting setelah mikrofon.

Negara tidak hanya membangun
kenyataan.
Negara membangun
citra kenyataan.

Drone merekam dari udara.
Baliho berbicara dari daratan.
Dan narasi kemajuan
mengalir ke timeline rakyat.

Keberhasilan pembangunan
diukur dari tiga hal:

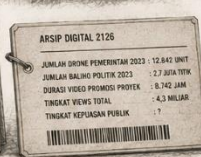
- ☒ Direkam dengan bagus.
- ☒ Terlihat megah.
- ☒ Viral di semua platform.

Substansi penting,
tetapi pencitraan
yang menentukan.

Karena dalam politik modern,
persepsi kemajuan
sering lebih penting
daripada pengalaman langsung.

Maka republik ini perlahan berubah
menjadi negara yang tidak pernah
selesai memesinkan dirinya sendiri.
Selalu ada proyek baru.
Selalu ada kamera baru.
Selalu ada jangi baru.
Dan selalu ada baliho baru.

Indonesia tidak pernah
kekurangan pembangunan.
Indonesia hanya terlalu sering
membangun panggangnya
lebih dulu daripada fondasinya.



BAB 6

KEMENTERIAN PENCITRAAN REPUBLIK INDONESIA

Negara yang Mengukur Kemajuan dari *Drone* dan Baliho

Pada awal abad ke-21, Indonesia berhasil menciptakan bentuk pembangunan paling fotogenik dalam sejarah modern. Negara tidak lagi sekadar membangun jalan. Negara membangun: jalan yang bagus untuk direkam *drone*. Jembatan tidak cukup kokoh. Ia harus: estetik dari udara. Bendungan tidak cukup berfungsi. Ia harus: *cinematic* saat matahari terbenam.

Dan sejak saat itu, pembangunan nasional perlahan berubah menjadi produksi konten visual berskala negara. Para sejarawan masa depan menyebut periode ini sebagai: Era Pencitraan Infrastruktur. Yaitu masa ketika keberhasilan pembangunan lebih sering diukur berdasarkan kualitas video promosi dibanding dampak jangka panjangnya terhadap rakyat.

Pada era tersebut, kamera menjadi alat negara paling penting setelah mikrofon. Hampir setiap proyek pembangunan memiliki ritual yang sama: peresmian, pidato, *drone*, tepuk tangan, lalu unggahan media sosial. Negara bergerak mengikuti logika sinematografi. Jika sebuah proyek tidak direkam dari udara dengan musik heroik, publik sering kali merasa proyek itu belum benar-benar ada. Maka lahirlah budaya politik kamera.

Para pejabat memahami satu hukum penting demokrasi digital: “Yang tidak viral dianggap tidak bekerja.” Akibatnya, hampir semua aktivitas pemerintahan berubah menjadi pertunjukan visual. Menteri turun ke lapangan sambil direkam. Pejabat menanam pohon sambil *live streaming*. Kunjungan kerja berubah menjadi konten

dokumenter. Bahkan sebagian birokrasi mulai tampak lebih sibuk mengatur sudut kamera dibanding substansi program.

Indonesia memasuki fase ketika negara bekerja dalam dua dunia sekaligus: dunia nyata, dan dunia dokumentasi. Kadang dokumentasinya jauh lebih rapi daripada kenyataannya. Pada masa itu, infrastruktur bukan lagi sekadar kebutuhan publik. Ia telah berevolusi menjadi simbol kekuasaan visual. Semakin besar proyek: semakin besar potensi elektoralnya. Karena rakyat mungkin tidak membaca: laporan ekonomi, indikator fiskal, ataupun reformasi kelembagaan, tetapi mereka selalu dapat memahami: jalan tol, bandara baru, atau bendungan raksasa.

Politik akhirnya menemukan bentuk komunikasi paling efektif: beton. Dan beton sangat fotogenik. *Drone-drone* pemerintah beterbangan di seluruh negeri seperti burung propaganda digital. Mereka merekam: jalan mulus, pelabuhan modern, kereta cepat, lampu kota, dan ekspresi bangga pejabat saat memakai rompi proyek. Video-video itu kemudian diedit dengan formula baku: musik epik, narasi penuh optimisme, warna jingga kebangsaan, dan kalimat besar seperti: “INDONESIA MAJU!”

Rakyat menonton sambil mengganggu. Tidak semua memahami dampak ekonominya. Tetapi semua sepakat videonya keren. Di titik itu, pembangunan telah berubah menjadi estetika nasional. Negara tidak hanya membangun kenyataan. Negara membangun citra kenyataan. Akibatnya, seremonial berkembang menjadi ritual utama republik.

Hampir tidak ada proyek yang terlalu kecil untuk diresmikan. Mulai dari: jalan desa, halte, embung, pasar, hingga toilet publik, semuanya memiliki potensi menjadi panggung pidato nasional. Peresmian menjadi bentuk seni politik tersendiri. Ada: gunting pita, penandatanganan prasasti, penekanan tombol simbolis, pelepasan burung,

hingga pose tangan ke kamera sambil tersenyum penuh visi kebangsaan. Republik perlahan berubah menjadi negara yang tidak pernah selesai meresmikan dirinya sendiri. Bahkan sebagian proyek lebih terkenal karena seremoni pembukaannya dibanding fungsi akhirnya.

Para antropolog media abad ke-22 menemukan fakta unik: rakyat Indonesia saat itu sering kali lebih hafal: nama proyek, slogan pembangunan, dan video *drone*, dibanding data operasional proyek tersebut. Namun itulah kekuatan politik simbolik. Karena dalam demokrasi visual, persepsi kemajuan sering lebih penting daripada pengalaman langsung.

Selama rakyat melihat: *crane*, beton, lampu kota, dan animasi 3D masa depan, mereka merasa negara sedang bergerak maju. Meskipun di saat bersamaan: harga pangan naik, lapangan kerja sempit, dan pelayanan publik tetap rumit. Tetapi kamera mampu menciptakan ilusi stabilitas. Dan ilusi adalah bahan bakar paling penting politik modern.

Pada masa itu, baliho politik tumbuh lebih cepat daripada pepohonan kota. Wajah elite nasional memenuhi: jalan raya, gang sempit, tiang listrik, bahkan area persawahan. Mereka tersenyum dengan ekspresi yang sama: penuh optimisme dan pencahayaan studio.

Dalam satu dekade, jumlah baliho politik meningkat lebih cepat daripada produksi pangan nasional. Para peneliti lingkungan bahkan sempat mengusulkan baliho sebagai spesies vegetasi urban baru. Karena ukurannya besar, tahan cuaca, dan berkembang biak menjelang pemilu.

Baliho menjadi simbol utama politik pencitraan. Di dalamnya terdapat semua unsur penting demokrasi visual: senyum, slogan, warna partai, dan janji masa depan. Tidak perlu terlalu rinci. Karena tujuan baliho bukan menjelaskan

kebijakan. Tujuannya: mengingatkan rakyat bahwa seseorang sedang ingin dipilih. Dan dalam politik modern, kadang itu sudah cukup.

Akibat budaya pencitraan yang berlebihan, negara perlahan mengalami krisis substansi. Pejabat lebih takut: tidak viral, dibanding tidak efektif. Kebijakan lebih sibuk: terlihat bekerja, dibanding benar-benar menyelesaikan masalah. Semua pihak berlomba menghasilkan simbol kemajuan: *groundbreaking*, *mockup*, *rendering* digital, dan presentasi futuristik.

Indonesia menjadi negara yang sangat mahir membayangkan masa depan. Masalahnya, masa depan itu terlalu sering berhenti di video animasi. Namun rakyat tetap menikmati pertunjukan itu. Karena di tengah kehidupan yang penuh ketidakpastian, optimisme visual terasa menenangkan. Meskipun kadang hanya bertahan selama durasi video promosi. Para filsuf politik abad ke-22 akhirnya menyimpulkan: “Indonesia tidak pernah kekurangan pembangunan. Indonesia hanya terlalu sering membangun panggungnya lebih dulu daripada fondasinya.”

ARSIP NASIONAL REPUBLIK RETORIKA

Arsip No. 007

DRONE PEMBANGUNAN

Kategori: Teknologi Dokumentasi Kemajuan Nasional

Periode Penggunaan: ±2015–2035

Status: Sangat Berpengaruh dalam Produksi Optimisme Publik

Lokasi Penemuan: Langit proyek infrastruktur, area peresmian nasional, kawasan strategis, dan seluruh tempat yang terlihat lebih indah dari udara.

Keterangan Kurator

Artefak ini merupakan salah satu penemuan paling penting dalam sejarah pencitraan pembangunan Indonesia abad ke-21. Secara teknis, drone adalah kendaraan udara tanpa awak yang dilengkapi kamera. Namun dalam praktik politik nasional, fungsinya berkembang jauh melampaui kebutuhan fotografi biasa. Drone digunakan untuk mengubah proyek pembangunan menjadi tontonan sinematik.

Jalan raya yang tampak biasa dari permukaan tanah dapat terlihat seperti simbol kemajuan peradaban ketika direkam dari ketinggian 300 meter dengan musik heroik. Bendungan yang belum sepenuhnya beroperasi dapat terlihat seperti mahakarya nasional ketika diambil pada sudut yang tepat saat matahari terbenam. Para peneliti komunikasi kemudian menyimpulkan bahwa drone tidak sekadar merekam pembangunan. Drone membantu pembangunan terlihat lebih meyakinkan.

Catatan Sejarawan Digital (2126)

Penelitian terhadap arsip video pemerintah periode 2018–2035 menemukan bahwa hampir seluruh proyek strategis nasional memiliki pola visual yang identik. Diawali dengan pemandangan udara. Dilanjutkan musik yang membangkitkan harapan. Kemudian muncul narasi optimistis mengenai masa depan bangsa. Lalu ditutup dengan gambar pejabat tersenyum di lokasi proyek. Fenomena tersebut kemudian dikenal sebagai: *Doktrin Perspektif Udara Nasional*. Yaitu keyakinan bahwa segala sesuatu akan terlihat lebih berhasil apabila direkam dari ketinggian yang cukup aman dari kenyataan di lapangan.

Rekonstruksi Percakapan Publik (tahun 2027)

Warga A: "Bagaimana kondisi proyek itu sekarang?"

Warga B: "Saya tidak tahu."

Warga A: "Sudah berfungsi?"

Warga B: "Belum tentu."

Warga A: "Lalu mengapa Anda yakin proyek itu berhasil?"

Warga B: "Saya melihat videonya dari drone."

Temuan Antropolog Digital

Kajian Universitas Arsip Nusantara tahun 2122 menemukan bahwa masyarakat Indonesia awal abad ke-21 memiliki hubungan emosional yang kuat terhadap gambar udara. Mereka cenderung menganggap sebuah proyek lebih penting apabila: direkam dari drone, diberi musik orkestra, memiliki logo resmi, dan diunggah dengan resolusi tinggi. Fenomena tersebut kemudian diberi nama: *Efek Elang Pembangunan*. Semakin tinggi sudut pengambilan gambar, semakin besar kemungkinan publik merasa negaranya sedang bergerak maju. Terlepas dari apakah mereka pernah mengunjungi lokasi tersebut.

Artefak Pendukung

Video Promosi Infrastruktur (sekitar tahun 2024)

Narasi yang ditemukan: "Inilah wajah baru Indonesia."

Peneliti tahun 2126 mencatat bahwa kalimat tersebut digunakan untuk sedikitnya 147 proyek berbeda.

Potongan Komentar Netizen

"Saya tidak tahu itu di mana, tapi kelihatannya keren." Komentar ini kemudian dianggap sebagai representasi paling murni dari konsumsi pembangunan visual era digital.

Hasil Penelitian Arkeologi Politik

Analisis terhadap ribuan video pembangunan menunjukkan bahwa objek yang paling sering direkam drone adalah: jalan tol, jembatan, bendungan, pelabuhan, kawasan industri, ibu kota baru, dan rombongan pejabat yang sedang berjalan sambil menunjuk sesuatu. Sementara objek seperti: laporan audit, evaluasi proyek, dan pembahasan biaya pemeliharaan, sangat jarang ditemukan dalam rekaman udara. Para ilmuwan masih mencoba menjelaskan fenomena tersebut.

Karakteristik Fisik Artefak

☒ Memiliki empat baling-baling. ☒ Dilengkapi kamera resolusi tinggi. ☒ Sering muncul menjelang peresmian proyek. ☒ Menyukai cuaca cerah dan cahaya matahari sore. ☒ Mampu menghasilkan rasa bangga

nasional dalam waktu kurang dari tiga menit. Para peneliti belum menemukan hubungan langsung antara kualitas video drone dan keberhasilan jangka panjang suatu proyek. Namun hubungan antara kualitas video drone dan jumlah tayangan media sosial terbukti sangat kuat.

Laporan Kondisi Artefak

Sebagian besar drone ditemukan dalam kondisi baik dan tersimpan dalam arsip visual nasional. Video yang dihasilkannya berhasil bertahan lebih lama dibanding sebagian janji yang menyertainya. Karena itu para kurator menganggap drone sebagai salah satu saksi paling setia Era Pencitraan Infrastruktur.

Peringatan Museum

Pengunjung dilarang mengoperasikan artefak ini tanpa izin petugas. Percobaan pada tahun 2118 menunjukkan bahwa satu drone pembangunan aktif mampu menghasilkan: 12 video promosi, delapan unggahan optimistis, empat presentasi investasi, dua slogan nasional, dan nol kilometer jalan tambahan dalam waktu kurang dari satu hari.

Kesimpulan Kurator

Banyak bangsa membangun kejayaannya dengan armada laut. Sebagian dengan pabrik. Sebagian dengan teknologi ruang angkasa. Indonesia abad ke-21 menemukan cara yang lebih sederhana. Mereka membangun citra kemajuan dari udara. Dan selama beberapa dekade, drone pembangunan menjadi mata resmi republik. Bukan untuk melihat apa yang sedang terjadi. Melainkan untuk memperlihatkan apa yang ingin dilihat.

Arsip Nasional Republik Retorika

Koleksi Permanen – Artefak Politik No. 007

"Pada era itu, pembangunan tidak dianggap lengkap sebelum direkam dari langit dan diiringi musik yang membuat masa depan terdengar sudah tiba."

BAB 7

DINASTI, OLIGARKI, DAN KERABAT NASIONAL

Demokrasi yang Tetap Tinggal Serumah dengan Feodalisme

Indonesia abad ke-21 sering menyebut dirinya negara demokrasi modern.

Namun di balik seluruh atribut modern itu, republik diam-diam masih memelihara sesuatu yang sangat tua: budaya keluarga kekuasaan.

Yaitu sistem ketika demokrasi tetap berjalan, tetapi jalur kekuasaan lebih mudah diwarikan kepada anak, menantu, saudara, ipar, atau sahabat lama pemilik modal.

Akibatnya, politik Indonesia mulai menyerupai kerajaan modern dengan dekorasi demokrasi.

Nama keluarga dapat berfungsi seperti merek dagang. Ia memiliki pengenalan publik, loyalitas massa, jaringan finansial, dan akses media.

Indonesia memasuki fase ketika hubungan darah mulai tampak lebih strategis dibanding ideologi.

Oligarki berkembang sangat elegan. Ia tidak lagi tampil kasar dan terang-terangan. Ia memakai jas rapi, bahasa investasi, dan istilah pembangunan berkelanjutan.

Pada akhirnya, republik ini memiliki dua sistem pemerintahan sekaligus: sistem konstitusi resmi, dan sistem hubungan elite informal.

★ CATATAN SEJARAHAN DIGITAL (2126) ★

“Indonesia tidak gagal menjadi demokrasi modern. Indonesia hanya terlalu sukses mempertahankan feodalisme dalam format digital.”
— Arsip Demokrasi 5.0

ARTEFAK POLITIK No. 007

DINASTI

SPECIES DOMINAN:

KERABAT ELITE

PERIODE:

2000–2035

KOPI STRATEGIS

CIRI-CIRI DINASTI MODERN

- ☒ NAMA KELUARGA DIKENAL
- ☒ AKSES MODAL BESAR
- ☒ KUASAI MEDIA
- ☒ KUASAI NARASI
- ☒ WARISAN KEKUASAAN
- ☒ REGENERASI TERJAMIN

CATATAN KURATOR (2126)

Arsip ini menunjukkan bahwa jalur kekuasaan tidak selalu diperoleh melalui proses merit. Dalam banyak kasus, kekuasaan lebih sering diwariskan daripada dibentuk.

MEMBANGUN
NEGERI UNTUK
GENERASI EMAS

ARSIP
OLIGARKI
INDONESIA
2000–2035

“YANG TERTULIS DI KONSTITUSI MENGATUR NEGARA.
YANG TERTULIS DI DAFTAR KONTAK MENGATUR KEKUASAAN.”

— Arsip Digital Demokrasi Indonesia, 2126

BAB 7

DINASTI, OLIGARKI, DAN KERABAT NASIONAL

Demokrasi yang Tetap Tinggal Serumah dengan Feodalisme

Indonesia abad ke-21 sering menyebut dirinya negara demokrasi modern. Pemilu rutin digelar. Debat politik disiarkan nasional. Partai-partai berbicara tentang reformasi, transparansi, dan masa depan. Namun di balik seluruh atribut modern itu, republik diam-diam masih memelihara sesuatu yang sangat tua: budaya keluarga kekuasaan.

Para ilmuwan politik masa depan menyebut fenomena ini sebagai: Feodalisme Elektoral. Yaitu sistem ketika demokrasi tetap berjalan, tetapi jalur kekuasaan lebih mudah diwariskan kepada: anak, menantu, saudara, ipar, atau sahabat lama pemilik modal. Indonesia memang memilih pemimpin melalui pemilu. Tetapi publik mulai menyadari bahwa nama belakang sering kali memiliki elektabilitas lebih tinggi dibanding pengalaman kerja.

Pada masa itu, politik perlahan berubah menjadi industri keluarga. Anak politisi menjadi calon politisi. Menantu pejabat menjadi calon pejabat. Kerabat elite ekonomi masuk parlemen. Dan lingkaran kekuasaan terus berputar di nama-nama yang itu juga. Rakyat menyebutnya: dinasti. Elite menyebutnya: regenerasi kepemimpinan. Sementara konsultan politik menyebutnya: kesinambungan *brand* keluarga. Karena dalam demokrasi modern, nama keluarga dapat berfungsi seperti merek dagang. Ia memiliki: pengenalan publik, loyalitas massa, jaringan finansial, dan akses media.

Semua itu jauh lebih mahal daripada sekadar kemampuan administrasi negara. Akibatnya, politik Indonesia mulai menyerupai kerajaan modern dengan

dekorasi demokrasi. Perbedaannya hanya satu: raja dipilih melalui survei elektabilitas.

Para elite politik hidup dalam ekosistem yang sangat tertutup. Mereka: menghadiri acara yang sama, berbicara dengan lingkaran yang sama, berbisnis dengan orang yang sama, lalu bergantian mengisi jabatan publik. Batas antara negara dan keluarga perlahan menjadi kabur. Pada titik tertentu, rakyat mulai kesulitan memahami: apakah sebuah keputusan politik dibuat melalui mekanisme kenegaraan, atau sekadar hasil makan malam keluarga elite.

Para ilmuwan politik kesulitan membedakan antara kabinet negara dan grup WhatsApp keluarga. Karena nama-nama yang muncul terus berulang. Indonesia memasuki fase ketika hubungan darah mulai tampak lebih strategis dibanding ideologi. Partai politik perlahan kehilangan fungsi kaderisasi. Mengapa repot membangun sistem meritokrasi jika publik lebih mudah memilih nama yang sudah terkenal? Maka lahirlah aristokrasi demokratis: kelas elite baru yang memperoleh legitimasi melalui kombinasi antara: popularitas, modal, koneksi, dan nostalgia kekuasaan.

Di era itu, oligarki berkembang sangat elegan. Ia tidak lagi tampil seperti penguasa klasik yang kasar dan terang-terangan. Oligarki modern memakai: jas rapi, *podcast*, bahasa investasi, dan istilah pembangunan berkelanjutan. Namun prinsip dasarnya tetap sama: kekuasaan cenderung berkumpul pada kelompok kecil dengan akses ekonomi besar. Para pengusaha besar masuk politik. Politisi masuk bisnis. Media dimiliki elite ekonomi.

Kampanye membutuhkan biaya luar biasa mahal. Akhirnya demokrasi menjadi arena yang sulit dimasuki tanpa dukungan modal besar. Rakyat memang memiliki suara. Tetapi panggung politik sering kali dimiliki oleh mereka yang mampu membayar pencahayaan panggungnya. Pada masa

itu, biaya pemilu meningkat sangat drastis. Kandidat membutuhkan: baliho, *buzzer*, iklan digital, survei, konten media sosial, dan pasukan *influencer*. Politik berubah menjadi industri dengan modal tinggi. Dan seperti semua industri mahal, pemain kecil perlahan tersingkir.

Ironisnya, semua itu tetap dibungkus bahasa kerakyatan. Elite berbicara tentang: wong cilik, rakyat kecil, demokrasi partisipatif, dan perjuangan masyarakat bawah, sambil menghadiri rapat strategi di hotel bintang lima dengan kopi seharga setengah gaji harian buruh.

Namun publik tidak sepenuhnya marah. Karena masyarakat Indonesia memiliki hubungan emosional yang unik terhadap kekuasaan. Mereka sering mengkritik elite, tetapi sekaligus mengagumi kedekatan elite dengan kekuasaan itu sendiri. Di sinilah feodalisme budaya bertahan diam-diam.

Banyak rakyat masih percaya bahwa: anak pemimpin pasti mewarisi kemampuan memimpin, keluarga pejabat pasti lebih siap berkuasa, dan lingkaran elite dianggap lebih pantas mengelola negara. Demokrasi modern ternyata tidak benar-benar menghapus mental kerajaan. Ia hanya mengganti: mahkota menjadi logo partai, dan istana menjadi kantor survei politik.

Media sosial memperparah keadaan. Keluarga elite kini dapat membangun citra publik sejak dini. Anak politisi tumbuh sebagai selebritas digital. Aktivitas keluarga dipoles menjadi konten humanis. Momen makan malam berubah menjadi strategi *branding*.

Publik diajak melihat elite bukan sebagai penguasa, melainkan: keluarga hangat yang kebetulan mengendalikan negara. Dan strategi itu sangat berhasil. Karena manusia modern lebih mudah terhubung dengan narasi personal

dibanding struktur kekuasaan abstrak. Akibatnya, oligarki Indonesia berkembang bukan melalui ketakutan. Ia berkembang melalui kedekatan emosional.

Rakyat merasa mengenal para elite karena melihat mereka setiap hari di layar. Padahal yang mereka kenal hanyalah versi editan algoritma. Sementara itu, kelompok ekonomi besar semakin kuat. Mereka mendanai: media, kampanye, organisasi, hingga produksi opini publik.

Negara perlahan bergerak mengikuti gravitasi modal. Bukan karena demokrasi gagal total. Tetapi karena demokrasi modern membutuhkan biaya yang terlalu mahal untuk bertahan tanpa sponsor. Dan sponsor jarang bekerja gratis. Pada akhirnya, Indonesia menjadi republik dengan dua sistem pemerintahan sekaligus: sistem konstitusi resmi, dan sistem hubungan elite informal.

Yang pertama tertulis di undang-undang. Yang kedua tertulis di daftar kontak pribadi. Para filsuf abad ke-22 kemudian menyimpulkan: “Indonesia tidak gagal menjadi demokrasi modern. Indonesia hanya terlalu sukses mempertahankan feodalisme dalam format digital.”

ARSIP NASIONAL REPUBLIK RETORIKA

Arsip No. 008

POHON DINASTI NASIONAL

Kategori: Flora Kekuasaan Turun-Temurun

Periode Penggunaan: ±1945–2035

Status: Sangat Adaptif terhadap Perubahan Sistem Politik

Lokasi Penemuan: Partai politik, pemerintahan daerah, parlemen nasional, ruang keluarga elite, dan berbagai tempat yang memiliki akses terhadap kekuasaan.

Keterangan Kurator

Artefak ini merupakan salah satu spesies politik paling menarik dalam sejarah Republik Indonesia. Secara biologis, pohon dinasti tidak pernah ditemukan. Namun secara politik, keberadaannya tercatat hampir di seluruh wilayah republik. Pohon ini memiliki karakteristik unik. Semakin tinggi posisi induknya dalam struktur kekuasaan, semakin besar peluang tunas-tunas baru tumbuh di sekitarnya. Berbeda dengan pohon biasa yang menghasilkan buah, Pohon Dinasti Nasional menghasilkan: calon kepala daerah, anggota legislatif, komisaris, penasihat, juru kampanye, dan penerus politik keluarga.

Catatan Sejarawan Digital (2126)

Analisis terhadap arsip politik Indonesia periode 1998–2035 menunjukkan bahwa sejumlah nama keluarga muncul secara berulang dalam berbagai jabatan publik. Fenomena ini awalnya dianggap kebetulan statistik. Namun setelah dipelajari lebih lanjut, para ilmuwan menemukan pola reproduksi politik yang sangat konsisten. Anak mengikuti orang tua. Menantu mengikuti mertua. Kerabat mengikuti kerabat. Sahabat lama mengikuti sahabat lama. Fenomena tersebut kemudian dikenal sebagai: *Hukum Regenerasi Elektoral Organik*. Yaitu kecenderungan bahwa kekuasaan lebih mudah berpindah melalui hubungan keluarga dibanding melalui proses kaderisasi yang panjang dan melelahkan.

Rekonstruksi Percakapan Publik (tahun 2029)

Warga A: "Bagaimana dia bisa menjadi calon pemimpin?"

Warga B: "Karena memiliki pengalaman politik."

Warga A: "Pengalaman apa?"

Warga B: "Sejak kecil sering ikut kampanye keluarganya."

Warga A: "Oh."

Temuan Antropolog Digital

Penelitian tahun 2120 menemukan bahwa masyarakat Indonesia memiliki hubungan yang cukup kompleks dengan fenomena dinasti politik. Mereka sering mengkritiknya Tetapi pada saat yang sama mereka juga merasa lebih akrab dengan nama yang sudah dikenal. Akibatnya, demokrasi Indonesia menghasilkan paradoks unik. Rakyat

mendukung perubahan. Tetapi perubahan tersebut sering menggunakan nama keluarga yang sama. Fenomena ini kemudian dikenal sebagai: *Teori Familiaritas Elektoral*. Semakin dikenal sebuah nama keluarga, semakin kecil energi yang diperlukan publik untuk mengingatnya saat hari pemungutan suara.

Artefak Pendukung

Bagan Silsilah Politik (sekitar tahun 2028)

Dokumen ini memperlihatkan hubungan antara: ayah, anak, menantu, ipar, saudara, dan mitra politik, dalam satu jaringan kekuasaan. Setelah dianalisis oleh AI tahun 2126, sistem sempat mengira dokumen tersebut adalah pohon keluarga kerajaan.

Komentar Netizen Anonim

"Negara ini demokrasi. Kebetulan kandidatnya masih keluarga semua." Komentar tersebut kini menjadi salah satu kutipan klasik dalam koleksi Museum Retorika Nusantara.

Hasil Penelitian Arkeologi Politik

Penggalian arsip pemilu menunjukkan bahwa sebagian besar dinasti politik berkembang melalui tiga tahap utama: tahap 1, satu anggota keluarga memenangkan jabatan publik. Tahap 2 kerabat dekat mulai memasuki arena politik. Tahap 3 Publik mulai kesulitan membedakan antara struktur pemerintahan dan acara keluarga besar. Para peneliti menyebut fase terakhir sebagai: *Konsolidasi Kekerabatan Demokratis*.

Karakteristik Fisik Artefak

☑ Memiliki akar kuat pada jaringan kekuasaan. ☑ Tahan terhadap pergantian rezim. ☑ Dapat tumbuh di tingkat lokal maupun nasional. ☑ Berkembang baik di lingkungan dengan akses modal tinggi. ☑ Sering menggunakan istilah "regenerasi" sebagai pupuk naratif. Para ilmuwan belum menemukan batas maksimum pertumbuhan spesies ini.

Laporan Kondisi Artefak

Pohon Dinasti Nasional ditemukan dalam kondisi sangat sehat. Bahkan beberapa cabangnya masih aktif berkembang hingga awal abad ke-22.

Tidak ditemukan tanda-tanda kepunahan. Sebaliknya, spesies ini menunjukkan kemampuan adaptasi yang luar biasa terhadap: demokrasi, media sosial, survei elektabilitas, dan teknologi pencitraan digital.

Peringatan Museum

Pengunjung dilarang menyiram artefak ini menggunakan: dana kampanye, akses media, hubungan bisnis, atau jabatan strategis. Percobaan tahun 2115 menunjukkan bahwa satu pohon dinasti dewasa mampu menghasilkan: empat kandidat, tujuh relawan, 12 juru bicara, 18 baliho, dan satu slogan tentang regenerasi kepemimpinan dalam satu musim pemilu.

Analisis Museum

Para kurator meyakini bahwa Pohon Dinasti Nasional merupakan bukti bahwa demokrasi dan feodalisme tidak selalu saling meniadakan. Di Indonesia abad ke-21, keduanya justru hidup berdampingan dengan cukup harmonis. Demokrasi menyediakan mekanisme pemilihan. Dinasti menyediakan daftar nama yang siap dipilih. Keduanya bekerja sama jauh lebih baik daripada yang diperkirakan para teoritikus politik abad sebelumnya.

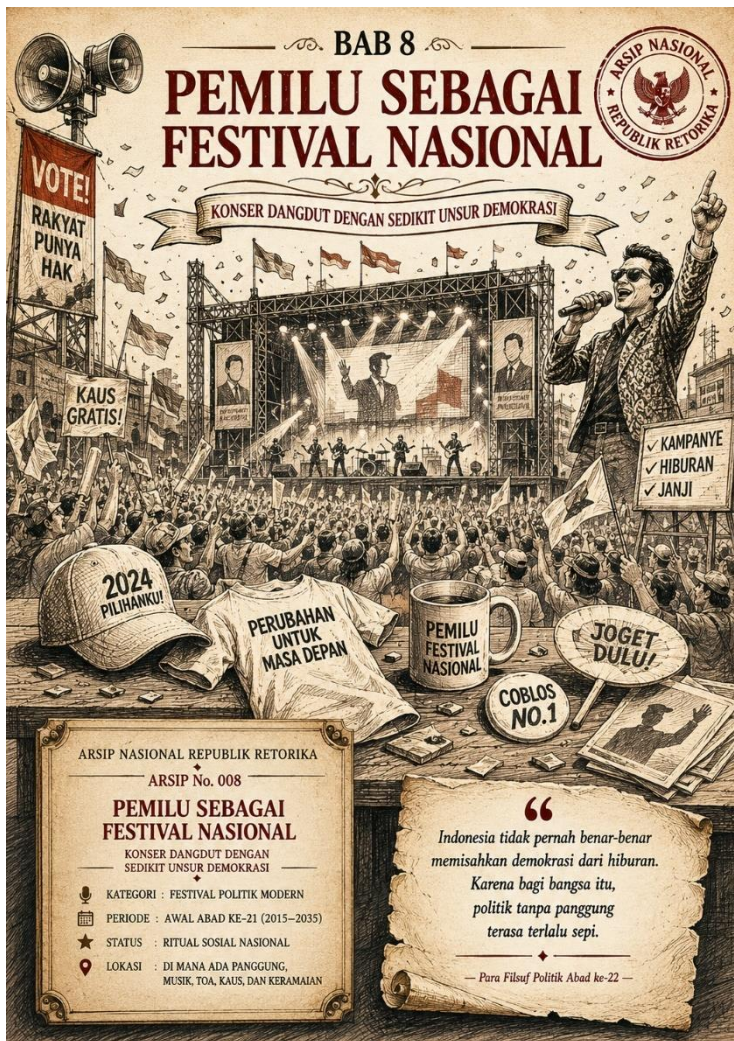
Kesimpulan Kurator

Banyak bangsa membangun masa depannya melalui sistem meritokrasi. Sebagian melalui revolusi. Sebagian lagi melalui reformasi kelembagaan. Indonesia menemukan jalur yang lebih akrab. Mereka membangun sebagian kekuasaan melalui hubungan keluarga. Dan selama puluhan tahun, Pohon Dinasti Nasional tumbuh subur di tengah taman demokrasi. Tidak menggantikan sistem politik. Hanya tumbuh tepat di dalamnya.

Arsip Nasional Republik Retorika

Koleksi Permanen – Artefak Politik No. 008

"Para peneliti akhirnya menyimpulkan bahwa di Indonesia abad ke-21, pohon keluarga sering kali memiliki nilai elektoral yang lebih tinggi daripada pohon pengetahuan."



BAB 8

PEMILU SEBAGAI FESTIVAL NASIONAL

Konser Dangdut dengan Sedikit Unsur Demokrasi

Pada awal abad ke-21, Indonesia berhasil menemukan bentuk paling meriah dari demokrasi modern. Negara-negara lain menyelenggarakan pemilu sebagai proses politik serius: penuh debat kebijakan, diskusi program, dan pertarungan gagasan. Indonesia menyelenggarakannya seperti: festival rakyat bersponsor.

Di masa itu, pemilu bukan sekadar mekanisme pergantian kekuasaan. Pemilu adalah musim hiburan nasional. Spanduk memenuhi jalanan seperti dekorasi ulang tahun republik. Panggung musik berdiri di lapangan desa. Konvoi kendaraan memenuhi kota. Dan suara toa politik terdengar lebih rutin dibanding azan subuh.

Seluruh negeri berubah menjadi arena kampanye raksasa. Para kandidat memahami bahwa rakyat modern sulit dipisahkan dari hiburan. Maka politik pun menyesuaikan diri. Kampanye tidak lagi cukup berupa pidato. Ia harus: menghibur, emosional, fotogenik, dan memiliki potensi viral. Di titik itu, demokrasi Indonesia memasuki fase: politik spektakel.

Para calon pemimpin tampil seperti bintang tur nasional. Mereka hadir di panggung dengan: musik pembuka, sorotan lampu, layar LED besar, dan yel-yel pendukung. Kadang sulit membedakan: mana kampanye politik, mana konser dangdut keliling. Perbedaannya hanya satu: di sela musik, ada janji pembangunan. Para ilmuwan budaya abad ke-22 menyebut fenomena ini sebagai: Demokrasi Karnaval. Yaitu kondisi ketika proses politik berubah menjadi perayaan massal yang lebih menekankan suasana dibanding substansi.

Rakyat datang ke kampanye bukan selalu untuk mendengar visi negara. Sebagian datang karena: artis ibu kota, hiburan gratis, pembagian kaus, atau sekadar ingin merasakan keramaian nasional. Dan tidak ada yang benar-benar salah dengan itu. Karena dalam masyarakat yang lelah oleh tekanan ekonomi, kampanye politik sering menjadi satu-satunya hiburan publik yang datang langsung ke kampung-kampung.

Musik dangdut memainkan peran penting dalam sejarah demokrasi Indonesia. Ia bukan sekadar hiburan. Ia adalah teknologi mobilisasi massa. Sebuah panggung dengan: biduan populer, *sound system* besar, dan kaus partai gratis, kadang lebih efektif menarik massa dibanding seminar kebijakan ekonomi.

Politik akhirnya memahami kenyataan paling mendasar tentang manusia: orang lebih mudah berkumpul karena hiburan dibanding ideologi. Akibatnya, kampanye berubah menjadi pertunjukan total. Calon pemimpin berjoget di panggung. Politisi menyanyi bersama artis lokal. Tokoh nasional melempar kaus ke kerumunan seperti superstar olahraga.

Pemilu 2024 dikenang sebagai satu-satunya peristiwa ketika masyarakat rela antre berjam-jam demi menerima kaus gratis. Kaus politik menjadi artefak budaya penting republik. Ia dipakai: ke pasar, ronda malam, pertandingan futsal, bahkan acara keluarga. Sebagian rakyat memiliki koleksi kaus kampanye lebih banyak dibanding pakaian formal. Dan warna kaus perlahan berubah menjadi identitas sosial.

Orang dapat dipetakan preferensi politiknya hanya dari warna pakaian saat menghadiri hajatan. Negara memasuki era: *merchandise democracy*. Demokrasi tidak lagi hanya menghasilkan pemimpin. Ia menghasilkan: *topi*, *tote*

bag, kalender, stiker, mug, hingga payung kampanye. Politik berubah menjadi industri suvenir nasional.

Sementara itu, debat publik ikut mengalami transformasi besar. Debat kandidat yang dahulu dirancang sebagai arena pertukaran gagasan berubah menjadi: *reality show* politik. Tim sukses lebih sibuk menyiapkan: *punchline*, ekspresi wajah, dan potensi meme, dibanding argumentasi kebijakan mendalam. Karena mereka tahu: rakyat tidak akan mengingat keseluruhan debat. Mereka hanya mengingat: satu kalimat viral, satu ekspresi marah, atau satu momen saling sindir.

Moderator debat perlahan memiliki fungsi mirip *host* acara televisi. Mereka harus menjaga: tempo, ketegangan, drama, dan rating penonton. Semakin panas suasana debat, semakin tinggi *engagement* media sosial. Maka debat politik pun mulai mengikuti logika sinetron nasional. Ada: protagonis, antagonis, pendukung fanatik, dan *cliffhanger* untuk potongan video TikTok.

Pada titik tertentu, demokrasi Indonesia menjadi sangat visual. Yang penting bukan lagi: apa isi jawaban kandidat. Yang penting: bagaimana ekspresinya saat menjawab.

Satu tatapan tajam bisa menjadi *headline* nasional. Satu jeda bicara bisa dianalisis berhari-hari. Satu kesalahan pengucapan dapat menjadi meme abadi internet. Akibatnya, para kandidat mulai dilatih seperti artis televisi. Mereka belajar: teknik kamera, kontrol ekspresi, intonasi suara, hingga posisi berdiri paling elektoral.

Politik tidak lagi cukup dikelola konsultan kebijakan. Ia membutuhkan: ahli pencitraan, sutradara visual, editor video, dan analis algoritma. Demokrasi akhirnya sepenuhnya masuk industri hiburan. Televisi memperoleh

rating tinggi. Media sosial memperoleh *traffic* besar. *Influencer* memperoleh konten. Dan rakyat memperoleh tontonan tanpa akhir. Sementara substansi perlahan tenggelam di balik lampu panggung. Namun justru itulah alasan pemilu Indonesia tetap terasa hidup. Karena ia bukan sekadar prosedur konstitusional. Ia adalah ritual sosial nasional.

Sebuah momen ketika: rakyat berkumpul, jalanan penuh warna, musik terdengar di mana-mana, dan seluruh negeri merasa sedang ikut dalam peristiwa besar. Walaupun kadang yang paling diingat dari pemilu bukan hasil kebijakannya. Melainkan: lagu kampanye, joget kandidat, dan siapa yang paling viral minggu itu. Para filsuf politik abad ke-22 akhirnya menyimpulkan: “Indonesia tidak pernah benar-benar memisahkan demokrasi dari hiburan. Karena bagi bangsa itu, politik tanpa panggung terasa terlalu sepi.”

ARSIP NASIONAL REPUBLIK RETORIKA

Arsip No. 009

MERCHANDISE PEMILU

Kategori: Artefak Konsumsi Demokrasi Massal

Periode Penggunaan: ±1999–2035

Status: Sangat Melimpah

Lokasi Penemuan: Kampanye politik, posko relawan, lapangan konser, pasar tradisional, lemari warga, dan laci yang sudah lama tidak dibuka.

Keterangan Kurator

Artefak ini merupakan salah satu produk paling sukses dalam sejarah demokrasi Indonesia modern. Secara teoritis, pemilu digunakan untuk memilih pemimpin. Namun dalam praktiknya, pemilu juga menghasilkan berbagai benda yang jauh lebih tahan lama dibanding sebagian janji kampanye. Di antaranya: kaus, topi, payung, kalender, stiker, mug, tote bag, kipas plastik, hingga gantungan kunci bergambar kandidat. Para peneliti budaya menyebut fenomena ini sebagai: *Demokrasi Merchandise*. Yaitu sistem politik di mana proses pemilihan umum sekaligus berfungsi sebagai industri souvenir nasional.

Catatan Sejarawan Digital (tahun 2126)

Arsip visual menunjukkan bahwa pada awal abad ke-21, hampir setiap musim pemilu menghasilkan jutaan benda promosi yang tersebar ke seluruh penjuru negeri. Sebagian warga bahkan memiliki lebih banyak kaus kampanye dibanding pakaian kerja. Di beberapa daerah, warna kaus politik menjadi penanda identitas sosial yang lebih mudah dikenali dibanding kartu anggota partai. Fenomena tersebut kemudian dikenal sebagai: *Teori Tekstil Elektoral*. Yaitu keyakinan bahwa dukungan politik dapat diperkuat melalui benda yang dapat dipakai, dibawa, atau dipajang di ruang tamu.

Rekonstruksi Percakapan Publik (tahun 2024)

Warga A: "Anda mendukung calon yang mana?"

Warga B: "Saya belum memutuskan."

Warga A: "Lalu mengapa memakai kaus itu?"

Warga B: "Bahannya nyaman."

Temuan Antropolog Digital

Penelitian tahun 2121 menemukan bahwa sebagian besar merchandise kampanye memiliki umur pakai yang jauh lebih panjang dibanding masa kampanyenya. Banyak artefak masih digunakan bertahun-tahun setelah pemilu selesai. Kaus menjadi pakaian rumah. Topi menjadi perlengkapan berkebun. Payung menjadi aset keluarga. Dan tote bag menjadi alat belanja permanen. Fenomena ini kemudian disebut: *Daur Ulang Demokrasi Praktis*. Yaitu kemampuan masyarakat Indonesia mengubah propaganda politik menjadi kebutuhan sehari-hari.

Artefak Pendukung

Kaus Kampanye Nasional (sekitar tahun 2024)

Tulisan yang ditemukan: "Bersama Menuju Masa Depan!" Peneliti tahun 2126 tidak berhasil menemukan masa depan spesifik yang dimaksud dalam artefak tersebut. Namun kualitas sablon masih cukup baik.

Topi Relawan Pemilu

Kondisi fisik: utuh; Nilai historis: tinggi; Nilai ideologis: sulit diukur; Nilai perlindungan dari sinar matahari: sangat memuaskan.

Komentar Netizen (tahun 2025)

"Saya lupa memilih siapa, tapi kausnya masih saya pakai sampai sekarang." Komentar ini kemudian menjadi salah satu sumber primer paling terkenal dalam studi budaya politik Indonesia.

Hasil Penelitian Arkeologi Politik

Ekskavasi terhadap gudang-gudang kampanye menemukan fakta menarik. Jumlah *merchandise* yang diproduksi selama satu musim pemilu sering kali melampaui jumlah dokumen kebijakan yang dibaca publik. Para ilmuwan menyimpulkan bahwa: sebagian rakyat mengenal kandidat melalui kaus, sementara sebagian kandidat berharap dikenal melalui program. Hasil akhirnya sangat bervariasi.

Karakteristik Fisik Artefak

☑ Berwarna mencolok. ☑ Menampilkan foto kandidat tersenyum. ☑ Memuat slogan optimistis. ☑ Diproduksi massal menjelang pemilu. ☑ Menghilang perlahan setelah hasil pemungutan suara diumumkan. Para ilmuwan belum menemukan hubungan langsung antara kualitas *merchandise* dan kualitas kepemimpinan. Namun hubungan antara jumlah *merchandise* dan besarnya anggaran kampanye sangat jelas terlihat.

Laporan Kondisi Artefak

Sebagian besar *merchandise* ditemukan dalam keadaan baik. Bahkan beberapa kaus kampanye berhasil bertahan lebih lama dibanding koalisi politik yang mencetaknya. Banyak artefak kini menjadi koleksi permanen Museum Retorika Nusantara karena dianggap mewakili semangat demokrasi paling kasual dalam sejarah republik.

Peringatan Museum

Pengunjung dilarang membawa pulang artefak ini. Percobaan pada tahun 2119 menunjukkan bahwa satu paket *merchandise* pemilu lengkap mampu menghasilkan: 14 unggahan media sosial, sembilan foto keluarga, enam diskusi politik, tiga pertengkaran ringan, dan satu keyakinan sementara bahwa masa depan akan lebih baik.

Analisis Museum

Para kurator berpendapat bahwa *merchandise* pemilu merupakan bukti bahwa demokrasi Indonesia tidak pernah sepenuhnya menjadi urusan ideologi. Ia juga merupakan urusan pengalaman sosial. Warga mungkin lupa isi debat. Mungkin lupa nomor urut kandidat. Mungkin lupa isi manifesto. Tetapi mereka sering mengingat kaus yang nyaman dipakai saat ronda malam. Dalam banyak kasus, benda-benda kecil inilah yang bertahan paling lama dalam ingatan kolektif.

Kesimpulan Kurator

Banyak bangsa meninggalkan dokumen konstitusi sebagai warisan politik. Sebagian meninggalkan arsip pidato. Sebagian lagi meninggalkan monumen. Indonesia meninggalkan sesuatu yang lebih sederhana. Lemari penuh kaus kampanye. Dan dari situlah para sejarawan masa depan memahami bahwa pemilu di republik ini bukan hanya soal memilih pemimpin. Ia juga merupakan festival nasional yang selalu menghasilkan oleh-oleh.

Arsip Nasional Republik Retorika

Koleksi Permanen – Artefak Politik No. 009

"Jika demokrasi adalah pesta rakyat, maka merchandise pemilu adalah souvenir resmi yang dibawa pulang setelah musik berhenti."



BAB 9

INDONESIA EMAS ATAU EMAS INDONESIA?

Ketika Masa Depan Dijadikan Slogan Massal

Setiap bangsa memiliki mimpi besar. Amerika memiliki *American Dream*. Jepang memiliki masyarakat teknologi tinggi. Singapura memiliki kota masa depan. Indonesia memiliki: Indonesia Emas. Kalimat itu terdengar megah. Optimistis. Patriotik. Dan sangat cocok dicetak di baliho ukuran raksasa.

Pada awal abad ke-21, hampir semua elite politik menggunakan istilah tersebut. Presiden menyebutnya. Menteri mengulanginya. *Influencer* politik menjadikannya konten. Motivator nasional mengubahnya menjadi seminar berbayar.

Indonesia Emas perlahan berkembang menjadi mantra pembangunan nasional. Ia muncul di: pidato kenegaraan, ruang kelas, seminar investasi, video promosi pemerintah, hingga spanduk acara RT. Tidak ada yang benar-benar ingin terlihat anti terhadap masa depan cerah. Masalahnya, semakin sering istilah itu dipakai, semakin sedikit orang yang benar-benar memahami maksudnya.

Indonesia Emas adalah konsep futuristik yang sangat canggih karena tidak pernah dijelaskan secara rinci. Justru di situlah kekuatannya. Karena slogan yang terlalu jelas mudah diperdebatkan. Sementara slogan yang samar dapat menampung: harapan, ambisi, ketakutan, dan fantasi seluruh bangsa sekaligus.

Indonesia Emas menjadi layar proyeksi nasional. Setiap orang bebas membayangkan versinya sendiri. Bagi pemerintah: Indonesia Emas berarti pertumbuhan ekonomi

tinggi. Bagi pengusaha: pasar besar dan stabilitas investasi. Bagi kelas menengah: gaji layak dan cicilan rumah lebih ringan. Bagi rakyat kecil: harga sembako tidak naik terlalu sering. Dan bagi *influencer* motivasi: materi konten tanpa akhir.

Pada masa itu, masa depan bukan lagi sekadar rencana pembangunan. Masa depan telah berubah menjadi produk komunikasi politik. Negara memasuki fase: optimisme *branding* nasional. Video-video promosi masa depan bermunculan di mana-mana. Indonesia digambarkan sebagai: kota futuristik, kereta super cepat, gedung kaca, mobil listrik, drone logistik, dan anak-anak tersenyum sambil memegang tablet digital. Semua tampak sangat modern. Bahkan terlalu modern untuk ukuran jalanan yang masih berlubang di banyak tempat.

Tetapi visualisasi masa depan memiliki fungsi psikologis penting: membuat rakyat percaya bahwa sesuatu yang besar sedang menuju mereka. Meskipun sering kali yang datang lebih dulu hanyalah: logo, *tagline*, dan animasi 3D.

Indonesia menjadi negara yang sangat mahir mempromosikan masa depan. Presentasi pembangunan penuh dengan: grafik naik, simulasi digital, istilah transformasi, dan musik optimistis. Semua orang berbicara tentang: bonus demografi, lompatan ekonomi, revolusi industri, hilirisasi, dan daya saing global. Namun di saat bersamaan, sebagian rakyat masih sibuk: mencari pekerjaan, membayar kontrakan, menghadapi harga pangan, dan bertahan di tengah ketidakpastian hidup sehari-hari.

Di titik itulah jarak antara slogan dan realitas mulai terasa. Tetapi negara modern memahami satu hal: harapan harus terus dipelihara. Karena tanpa harapan, slogan tidak akan bekerja. Maka retorika visi besar diproduksi terus-menerus.

Setiap pergantian pemerintahan membawa: target besar, *roadmap* baru, jargon segar, dan janji percepatan sejarah. Indonesia seperti bangsa yang selalu berada di ambang kejayaan. Sayangnya, ambang itu sering berpindah setiap lima tahun. Para ekonom mencoba menjelaskan kondisi nyata menggunakan data. Namun data sulit bersaing melawan slogan yang terdengar heroik. Karena angka pertumbuhan ekonomi tidak seemosional: “Menuju Indonesia Emas 2045!”

Politik modern memahami bahwa manusia lebih mudah bergerak oleh narasi dibanding statistik. Maka masa depan dikemas seperti *trailer* film *blockbuster* nasional. Ada: musik megah, narasi penuh semangat, visual futuristik, dan janji bahwa generasi berikutnya akan hidup jauh lebih baik.

Tidak ada yang salah dengan optimisme. Masalah muncul ketika slogan mulai menggantikan evaluasi nyata. Pada masa itu, kritik terhadap proyek pembangunan sering dianggap: pesimis, anti kemajuan, atau tidak nasionalis. Seolah-olah mencintai negara berarti wajib percaya seluruh target akan berhasil tepat waktu. Padahal sejarah Indonesia menunjukkan satu pola unik: bangsa ini sangat ahli merancang masa depan, tetapi sering kesulitan mengelola kenyataan sehari-hari.

Namun rakyat tetap mencintai slogan-slogan besar itu. Karena di tengah tekanan hidup, mimpi kolektif terasa menenangkan. Indonesia Emas memberi rakyat sesuatu yang sangat penting: ilusi arah bersama. Meskipun kadang arah itu lebih jelas di video animasi dibanding di lapangan. Media sosial memperparah keadaan.

Setiap proyek langsung diberi label: menuju Indonesia Emas, bagian transformasi nasional, atau bukti lompatan peradaban. Akhirnya, istilah “Indonesia Emas” menjadi begitu fleksibel hingga dapat dipakai untuk hampir

semua hal: jalan tol, festival budaya, aplikasi digital, program makan siang, bahkan lomba TikTok sekolah.

Republik memasuki era: inflasi jargon pembangunan. Semakin besar slogan, semakin sulit mengukurnya. Tetapi justru karena itulah slogan tetap bertahan. Karena sesuatu yang tidak jelas batasnya akan selalu terlihat mungkin.

Para peneliti abad ke-22 kemudian menemukan fakta menarik. Sebagian besar rakyat Indonesia sebenarnya tidak terlalu yakin seperti apa bentuk Indonesia Emas nantinya. Tetapi mereka tetap menyukai kalimat itu. Karena bunyinya hangat. Optimistis. Dan membuat masa depan terasa sedikit kurang menakutkan.

Pada akhirnya, Indonesia Emas bukan hanya proyek politik. Ia adalah: terapi nasional, produk harapan massal, dan mekanisme psikologis bangsa yang terlalu lama hidup di antara krisis dan janji. Para filsuf politik abad ke-22 kemudian menyimpulkan: “Indonesia tidak pernah benar-benar mengejar masa depan. Indonesia mengejar perasaan bahwa masa depan akan baik-baik saja.”

ARSIP NASIONAL REPUBLIK RETORIKA

Arsip No. 010

INDONESIA EMAS

Kategori: Artefak Harapan Nasional Jangka Panjang

Periode Penggunaan: ±2019–2045

Status: Sangat Populer, Sulit Didefinisikan

Lokasi Penemuan: Pidato kenegaraan, baliho pembangunan, dokumen perencanaan, seminar motivasi, ruang kelas, media sosial, dan hampir semua tempat yang membutuhkan optimisme kolektif.

Keterangan Kurator

Artefak ini merupakan salah satu slogan pembangunan paling terkenal dalam sejarah Indonesia modern. Berbeda dengan jalan tol yang dapat

diukur panjangnya, atau bendungan yang dapat dihitung kapasitasnya, Indonesia Emas memiliki sifat yang jauh lebih kompleks. Ia tidak berbentuk bangunan. Ia tidak berbentuk program. Ia tidak berbentuk kebijakan tunggal. Ia berbentuk masa depan. Dan seperti semua masa depan, keberadaannya selalu berada sedikit lebih jauh dari jangkauan hari ini.

Pada awal abad ke-21, istilah ini digunakan untuk menggambarkan kondisi ideal Indonesia pada usia seratus tahun kemerdekaan. Masalahnya, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda mengenai seperti apa bentuk ideal tersebut. Akibatnya, Indonesia Emas menjadi salah satu artefak politik paling fleksibel yang pernah ditemukan.

Catatan Sejarawan Digital (tahun 2126)

Analisis terhadap lebih dari 12 juta dokumen publik periode 2020–2045 menemukan bahwa istilah Indonesia Emas digunakan untuk menjelaskan hampir segala hal. Mulai dari: pendidikan, infrastruktur, ekonomi, teknologi, investasi, pangan, olahraga, kebudayaan, hingga lomba kreativitas pelajar. Fenomena tersebut kemudian dikenal sebagai: *Teori Elastisitas Jargon Nasional*. Yaitu kemampuan sebuah slogan untuk menjelaskan semua hal tanpa harus menjelaskan dirinya sendiri.

Rekonstruksi Percakapan Publik (tahun 2030)

Warga A: "Apa sebenarnya Indonesia Emas?"

Warga B: "Masa depan yang lebih baik."

Warga A: "Seperti apa bentuknya?"

Warga B: "Itu tergantung presentasi PowerPoint yang sedang ditampilkan."

Temuan Antropolog Digital

Penelitian tahun 2123 menemukan bahwa mayoritas masyarakat Indonesia sebenarnya tidak memiliki definisi yang sama mengenai Indonesia Emas. Namun mereka tetap menyukai istilah tersebut. Alasannya sederhana. Kalimat itu terdengar: optimistis, patriotik, aman, dan menjanjikan. Fenomena ini kemudian diberi nama: *Efek Selimut Harapan Nasional*. Yaitu kondisi ketika sebuah slogan

memberikan rasa nyaman kolektif meskipun rincian isinya belum sepenuhnya jelas.

Artefak Pendukung

Potongan Pidato Nasional (sekitar tahun 2027)

"Menuju Indonesia Emas!" Kalimat ini ditemukan dalam ribuan pidato berbeda dengan konteks yang sering kali tidak saling berkaitan.

Poster Pembangunan (tahun 2029)

Tulisan yang ditemukan: "Bersama Mewujudkan Indonesia Emas"

Tim peneliti tahun 2126 masih mencari dokumen yang menjelaskan secara rinci bagian "bersama" dan "mewujudkan."

Komentar Netizen Anonim

"Saya belum tahu Indonesia Emas itu seperti apa, tapi saya berharap cicilan saya tidak ikut naik." Komentar ini kemudian dianggap sebagai representasi paling jujur dari hubungan rakyat dengan visi pembangunan jangka panjang.

Hasil Penelitian Arkeologi Politik

Penggalan arsip digital menemukan bahwa Indonesia Emas hampir selalu disertai oleh: grafik yang naik, gedung futuristik, kereta cepat, anak-anak tersenyum, animasi kota masa depan, dan musik yang terdengar mahal. Sementara unsur-unsur seperti: antrean layanan publik, harga kebutuhan pokok, dan jalan lingkungan yang rusak, lebih jarang muncul dalam visualisasi resmi. Para ilmuwan menyebut fenomena tersebut sebagai: *Kurasi Optimisme Visual*.

Karakteristik Fisik Artefak

☑ Selalu terdengar menjanjikan. ☑ Sulit diperdebatkan karena definisinya luas. ☑ Cocok dicetak di baliho ukuran besar. ☑ Sering muncul menjelang peluncuran program baru. ☑ Memiliki daya tahan politik lintas pemerintahan. Para peneliti belum berhasil menentukan ukuran pasti dari "emas" yang dimaksud.

Laporan Kondisi Artefak

Artefak ditemukan dalam kondisi sangat baik. Tidak menunjukkan tanda-tanda kerusakan meskipun telah digunakan oleh berbagai institusi, partai politik, kementerian, akademisi, influencer, dan pembicara seminar motivasi. Kemampuan adaptasinya dianggap luar biasa. Slogan ini mampu bertahan melewati perubahan kabinet, perubahan teknologi, dan perubahan tren media sosial.

Peringatan Museum

Pengunjung dilarang meresapi dan mendalami isi artefak ini secara berlebihan tanpa disertai data pendukung. Paparan jangka panjang dapat menyebabkan: optimisme kronis, ketergantungan terhadap target jangka panjang, keyakinan bahwa semua masalah akan selesai pada tahun tertentu, dan kesulitan membedakan antara rencana, visi, serta kenyataan.

Analisis Museum

Para kurator meyakini bahwa Indonesia Emas bukan sekadar slogan pembangunan. Ia adalah produk psikologis sebuah bangsa. Setiap generasi membutuhkan alasan untuk percaya bahwa masa depan akan lebih baik daripada masa kini. Indonesia Emas menyediakan alasan tersebut. Bukan karena seluruh rakyat memahami detailnya.

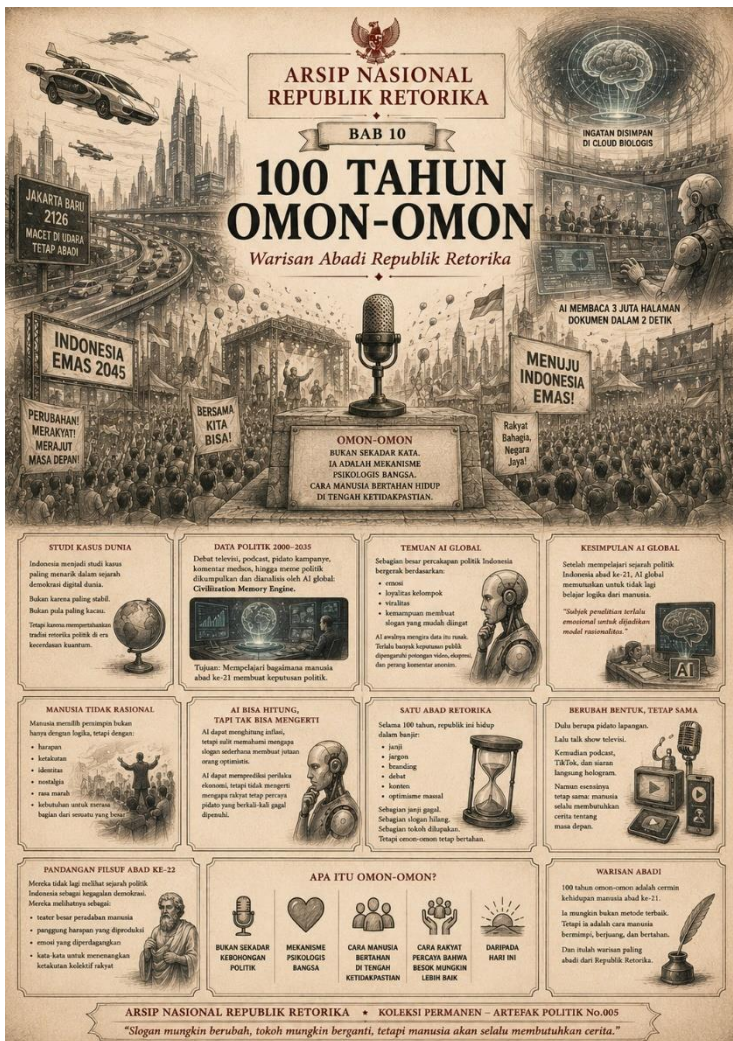
Kesimpulan Kurator

Banyak bangsa membangun monumen untuk mengenang masa lalu. Indonesia abad ke-21 memilih membangun monumen untuk masa depan. Monumen itu tidak terbuat dari batu. Tidak terbuat dari baja. Tidak pula terbuat dari emas. Ia terbuat dari harapan. Dan selama beberapa dekade, harapan itu dicetak di baliho, diucapkan dalam pidato, diputar dalam video promosi, dan diwariskan dari satu pemerintahan ke pemerintahan berikutnya.

Arsip Nasional Republik Retorika

Koleksi Permanen – Artefak Politik No. 010

"Para peneliti abad ke-22 akhirnya menyimpulkan bahwa Indonesia Emas adalah satu-satunya tambang nasional yang seluruh cadangannya terdiri atas harapan."



BAB 10

100 TAHUN OMON-OMON

Warisan Abadi Republik Retorika

Pada tahun 2126, dunia telah berubah jauh melampaui imajinasi manusia abad ke-21. Mobil terbang akhirnya benar-benar ada, meskipun tetap terjebak macet di udara Jakarta Baru. Manusia dapat menyimpan ingatan di *cloud* biologis. AI telah menggantikan sebagian besar profesi birokrasi. Dan sidang parlemen kini diselesaikan oleh algoritma yang mampu membaca tiga juta halaman dokumen dalam dua detik tanpa tertidur.

Tetapi setelah seluruh lompatan teknologi itu, para ilmuwan politik global menemukan fakta mengejutkan: manusia ternyata tetap sama. Mereka masih: menyukai slogan, mudah terpancing emosi, memuja tokoh, membenci lawan politik, dan percaya bahwa pidato yang cukup keras mampu mengalahkan kenyataan.

Indonesia menjadi studi kasus paling menarik dalam sejarah demokrasi digital dunia. Bukan karena republik ini paling stabil. Bukan pula karena paling kacau. Tetapi karena Indonesia berhasil mempertahankan tradisi retorika politik bahkan ketika dunia sudah memasuki era kecerdasan kuantum.

Di abad ke-22, sebagian besar negara telah menyerahkan banyak fungsi pemerintahan kepada sistem AI. Kebijakan publik dihitung menggunakan: simulasi probabilitas, prediksi sosial, dan pemetaan perilaku populasi. Korupsi turun drastis karena algoritma sulit disuap menggunakan proposal proyek fiktif. Debat parlemen menjadi jauh lebih singkat karena AI langsung memotong argumen yang tidak relevan.

Namun Indonesia tetap menyimpan sesuatu yang unik: kecintaan emosional terhadap omon-omon. Para arsiparis digital menemukan bahwa sepanjang sejarah republik, rakyat Indonesia selalu memiliki hubungan yang sangat intim dengan kata-kata. Bangsa ini mungkin sering gagal menyelesaikan banyak hal tepat waktu. Tetapi mereka tidak pernah gagal memproduksi: slogan, jargon, pidato, singkatan program, dan kalimat motivasi nasional.

Indonesia seperti peradaban yang membangun dirinya menggunakan retorika. Bahkan ketika kenyataan tidak bergerak cepat, kata-kata selalu bergerak lebih dulu. Karena itu, pada awal abad ke-22, proyek penelitian internasional terbesar tentang demokrasi digital dilakukan terhadap arsip politik Indonesia tahun 2000–2035. Seluruh: debat televisi, *podcast*, pidato kampanye, komentar media sosial, hingga meme politik, dikumpulkan lalu dianalisis oleh AI global bernama: *Civilization Memory Engine*.

Tujuan penelitian itu sederhana: mempelajari bagaimana manusia abad ke-21 membuat keputusan politik. Hasilnya mengejutkan. AI menemukan bahwa sebagian besar percakapan politik Indonesia tidak bergerak berdasarkan: logika kebijakan, konsistensi ideologi, ataupun argumentasi rasional. Sebagian besar bergerak berdasarkan: emosi, loyalitas kelompok, viralitas, dan kemampuan membuat slogan yang mudah diingat.

Sistem AI awalnya mengira data itu rusak. Karena secara matematis, terlalu banyak keputusan publik dipengaruhi oleh: potongan video, ekspresi wajah, dan perang komentar anonim. Setelah mempelajari sejarah politik Indonesia abad ke-21, AI global memutuskan untuk tidak lagi belajar logika dari manusia. Laporan resmi mereka sangat singkat: “Subjek penelitian terlalu emosional untuk dijadikan model rasionalitas.”

Namun justru di situlah letak keunikan manusia. Karena manusia ternyata tidak memilih pemimpin hanya menggunakan logika. Mereka memilih menggunakan: harapan, ketakutan, identitas, nostalgia, rasa marah, dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari sesuatu yang besar.

AI kesulitan memahami itu. Algoritma dapat menghitung inflasi. Tetapi ia sulit memahami mengapa satu slogan sederhana mampu membuat jutaan orang merasa optimistis. Mesin dapat memprediksi perilaku ekonomi. Tetapi ia tidak mengerti mengapa rakyat tetap percaya pidato yang berkali-kali gagal dipenuhi. Dan mungkin memang itulah inti demokrasi manusia: ia tidak pernah sepenuhnya rasional.

Indonesia hanya memperlihatkan kenyataan itu dengan cara paling berisik. Selama satu abad, republik ini hidup dalam banjir: janji, jargon, *branding*, debat, konten, dan optimisme massal. Sebagian janji gagal. Sebagian slogan hilang. Sebagian tokoh dilupakan. Tetapi omon-omon tetap bertahan. Ia berubah bentuk mengikuti zaman.

Dulu berupa pidato lapangan. Lalu berubah menjadi *talk show* televisi. Kemudian menjadi *podcast*, TikTok, dan siaran langsung hologram. Namun esensinya tetap sama: manusia selalu membutuhkan cerita tentang masa depan. Meskipun mereka diam-diam tahu cerita itu mungkin terlalu indah untuk menjadi nyata.

Di titik itu, para filsuf abad ke-22 mulai memandang sejarah politik Indonesia dengan cara berbeda. Mereka tidak lagi melihatnya sebagai kegagalan demokrasi. Mereka melihatnya sebagai: teater besar peradaban manusia. Sebuah panggung tempat: harapan diproduksi, emosi diperdagangkan, dan kata-kata dipakai untuk menenangkan ketakutan kolektif rakyat terhadap masa depan.

Karena pada akhirnya, omon-omon bukan sekadar kebohongan politik. Ia adalah mekanisme psikologis bangsa. Cara manusia bertahan hidup di tengah ketidakpastian. Cara rakyat percaya bahwa besok mungkin lebih baik daripada hari ini.

ARSIP NASIONAL REPUBLIK RETORIKA

Arsip No. 011

REPUBLIK OMON-OMON

Kategori: Artefak Peradaban Nasional

Periode Penggunaan: ±1945–2035

Status: Koleksi Mahakarya Permanen

Tingkat Pengaruh: Tidak Terukur

Lokasi Penemuan: Seluruh wilayah Republik Indonesia, termasuk area yang tidak memiliki sinyal internet.

Keterangan Kurator

Artefak ini merupakan koleksi paling penting dalam Museum Republik Retorika. Berbeda dengan arsip sebelumnya yang berupa benda, simbol, atau fenomena tertentu, Republik Omon-Omon adalah artefak induk yang menaungi semuanya. Di dalamnya terdapat: mikrofon politik, baliho nasional, makan bergizi gratis, podcast politik, komentar netizen, drone pembangunan, pohon dinasti, merchandise pemilu, Indonesia Emas, dan jutaan slogan lain yang pernah hidup, viral, lalu menghilang. Para kurator kesulitan menentukan bentuk fisik artefak ini. Karena Republik Omon-Omon bukan benda. Ia adalah ekosistem.

Catatan Sejarawan Digital (2126)

Setelah menganalisis lebih dari satu abad arsip politik Indonesia, para peneliti menemukan pola yang terus berulang. Setiap periode memiliki: tokoh baru, partai baru, program baru, teknologi baru, dan slogan baru. Namun substansi percakapannya sering terdengar sangat familiar. Janji berubah. Jargon berganti. Logo diperbarui. Tetapi kalimat seperti: "Demi rakyat." "Menuju masa depan." "Perubahan sedang berlangsung." "Tunggu hasilnya." terus muncul dari generasi ke generasi. Fenomena ini kemudian dikenal sebagai: *Siklus Retorika*

Nasional Abadi. Yaitu kondisi ketika kata-kata politik mengalami regenerasi lebih cepat daripada penyelesaian masalah yang dijelaskannya.

Rekonstruksi Percakapan Publik (tahun 2035)

Warga A: "Apakah kali ini akan berbeda?"

Warga B: "Mungkin."

Warga A: "Apa yang berubah?"

Warga B: "Slogannya."

Temuan Antropolog Digital

Penelitian internasional tahun 2124 menemukan fakta yang mengejutkan. Indonesia bukan negara yang paling banyak menghasilkan kebijakan. Bukan negara yang paling banyak menghasilkan undang-undang. Bukan pula negara yang paling banyak menghasilkan inovasi teknologi. Tetapi Indonesia termasuk salah satu negara paling produktif dalam memproduksi: jargon, singkatan program, slogan pembangunan, istilah politik, dan kalimat optimistis. Akibatnya, republik ini sering digambarkan oleh para akademisi global sebagai: *Peradaban Retorika Tropis*. Sebuah masyarakat yang mampu menciptakan harapan dalam jumlah lebih besar daripada kapasitas penyimpanan arsip digitalnya.

Artefak Pendukung

Potongan Pidato Nasional (Rekonstruksi)

"Kita harus optimistis." Kalimat ini ditemukan pada hampir setiap dekade penelitian.

Komentar Netizen (tahun 2026)

"Saya tidak tahu siapa yang benar, tapi saya sudah memilih kubu." Dokumen ini kemudian dianggap sebagai salah satu ringkasan politik digital paling akurat pada masanya.

Potongan Podcast Politik

"Izinkan saya menjelaskan." Rekaman berlanjut selama tiga jam empat puluh tujuh menit. Tidak ditemukan kesimpulan final.

Hasil Penelitian Arkeologi Politik

Pada tahun 2125, proyek internasional *Civilization Memory Engine* berhasil menyelesaikan analisis terbesar terhadap arsip politik Indonesia abad ke-21. Mereka memproses: jutaan jam pidato, miliaran komentar, puluhan juta video, dan ratusan juta unggahan media sosial. Kesimpulan resmi mereka hanya terdiri atas satu kalimat: "Manusia Indonesia sangat menyukai percakapan tentang masa depan." Laporan tambahan setebal 8.000 halaman kemudian menjelaskan bahwa sebagian besar percakapan tersebut belum menghasilkan kesepakatan.

Karakteristik Fisik Artefak

☑ Tidak memiliki bentuk tetap. ☑ Dapat muncul dalam pidato, podcast, debat, unggahan, atau komentar. ☑ Berkembang sangat cepat menjelang pemilu. ☑ Tahan terhadap pergantian rezim. ☑ Hampir mustahil diberantas. Para ilmuwan hingga kini, dalam konteks buku berarti tahun 2126 belum menemukan vaksin yang efektif terhadap penyebaran omon-omon politik.

Laporan Kondisi Artefak

Artefak ditemukan dalam kondisi sangat aktif. Meskipun era yang melahirkannya telah lama berlalu, jejak-jejaknya masih dapat ditemukan dalam berbagai bentuk komunikasi publik modern. Bahkan beberapa algoritma kecerdasan buatan diketahui mulai meniru pola retorika tersebut setelah terlalu lama mempelajari arsip Indonesia abad ke-21. Eksperimen tersebut kemudian segera dihentikan.

Peringatan Museum

Pengunjung dilarang memasuki ruang artefak ini tanpa pendamping. Paparan berkepanjangan dapat menyebabkan: optimisme tanpa data, keyakinan bahwa slogan adalah kebijakan, kecanduan debat daring, serta dorongan mendadak untuk menjadi narasumber *podcast* politik. Percobaan tahun 2123 menunjukkan bahwa satu unit Republik Omon-Omon aktif mampu menghasilkan: 23 janji baru, 11 visi nasional, tujuh slogan pembangunan, empat survei elektabilitas, Dan 0 menit keheningan dalam waktu kurang dari satu jam.

Analisis Museum

Para kurator akhirnya menyadari bahwa Republik Omon-Omon tidak boleh dipahami sebagai kegagalan politik. Ia adalah produk alami manusia. Manusia membutuhkan cerita. Manusia membutuhkan harapan. Manusia membutuhkan tokoh. Dan manusia membutuhkan kata-kata untuk menjelaskan masa depan yang belum mereka pahami. Indonesia hanya melakukan semuanya dalam skala yang jauh lebih besar dan lebih berisik. Karena itulah arsip ini dipertahankan. Bukan untuk ditertawakan. Bukan pula untuk disalahkan. Melainkan untuk diingat. Sebagai bukti bahwa sebuah bangsa pernah mencoba menenangkan ketidakpastian hidup dengan cara yang paling manusiawi: berbicara tentang masa depan seolah-olah ia sudah datang.

Kesimpulan Kurator

Banyak peradaban dikenang karena piramida. Sebagian karena tembok raksasa. Sebagian karena revolusi ilmiah. Indonesia abad ke-21 meninggalkan warisan yang berbeda. Ia meninggalkan jutaan kata. Sebagian menjadi slogan. Sebagian menjadi meme. Sebagian menjadi pidato. Sebagian menjadi konten. Dan sebagian besar menjadi arsip. Namun ketika seluruh artefak itu dikumpulkan dalam satu ruangan, para sejarawan akhirnya memahami sesuatu yang sederhana: Republik ini tidak pernah kekurangan ide. Republik ini tidak pernah kekurangan harapan. Republik ini hanya terlalu sering percaya bahwa mengucapkan sesuatu adalah langkah yang sama dengan mewujudkannya.

Arsip Nasional Republik Retorika

Koleksi Permanen – Artefak Politik No. 011

"Setelah seratus tahun mempelajari sejarah Republik Omon-Omon, para ilmuwan akhirnya mencapai kesimpulan yang disepakati bersama: rakyat Indonesia tidak pernah kehabisan kata-kata. Mereka hanya sesekali kehabisan waktu untuk memeriksa apakah kata-kata itu benar-benar terjadi."

EPILOG

Museum Jargon Nasional

Tahun 2126, saat buku ini ditulis. Hujan turun perlahan di atas kawasan pesisir Jakarta Baru. Air laut memantulkan cahaya neon dari menara-menara terapung yang kini menjadi pusat administrasi Republik Indonesia Pasca-Daratan. Kapal listrik melintas tanpa suara. *Drone* patroli bergerak seperti burung mekanik di langit abu-abu.

Dan di tengah kota futuristik itu, berdiri sebuah bangunan tua yang masih dipertahankan negara sebagai situs sejarah nasional: Museum Jargon Nasional. Bangunannya tidak terlalu besar. Namun antrean pengunjung selalu panjang. Terutama pelajar Gen Eta yang datang untuk mempelajari salah satu fenomena paling aneh dalam sejarah manusia: demokrasi Indonesia abad ke-21.

Di pintu masuk museum terdapat tulisan holografik besar: “SELAMAT DATANG DI ERA KETIKA MANUSIA PERCAYA PIDATO DAPAT MENYELESAIKAN SEGALANYA”. Anak-anak sekolah biasanya tertawa membaca kalimat itu. Beberapa mengira itu satire. Guru sejarah mereka menjelaskan: “Tidak. Itu arsip asli.”

Museum itu dibagi menjadi beberapa ruangan tematik. Ruang pertama bernama: *Galeri Janji Nasional*. Di sana tersimpan ribuan slogan pembangunan yang pernah dipakai selama satu abad. Dinding museum dipenuhi kalimat: revolusi mental, lompatan kemajuan, transformasi nasional, Indonesia Emas, percepatan sejarah, dan berbagai jargon lain yang dahulu diucapkan dengan ekspresi sangat serius.

AI pemandu museum akan menjelaskan sejarah tiap slogan sambil memproyeksikan video kampanye asli.

Sebagian pengunjung tertawa. Sebagian lagi tampak bingung mengapa manusia masa lalu sangat menyukai kata: “transformasi”.

Di ruang kedua, tersimpan koleksi: *Baliho Politik Nasional*. Ukuran baliho-baliho itu sangat besar. Wajah para elite politik abad ke-21 tersenyum abadi dalam pencerahan digital yang terlalu sempurna untuk ukuran negara berkembang. Beberapa baliho sudah sobek dimakan usia. Namun slogan-slogannya tetap terbaca jelas: “BERSAMA RAKYAT!” “LANJUTKAN!” “MENUJU MASA DEPAN!” “PERUBAHAN UNTUK SEMUA!”

Seorang anak Gen Eta bertanya: “Apakah mereka benar-benar percaya rakyat membaca semua itu?” Pemandu hologram menjawab: “Tidak selalu. Tetapi mereka percaya rakyat akan melihat wajahnya.”

Di ruangan berikutnya, museum menyimpan: *Arsip Pertengkar Nasional*. Ruangan itu paling ramai. Pengunjung dapat menyaksikan: potongan video debat, rekaman saling sindir antar-elite, perang tagar, komentar media sosial, hingga *podcast* politik yang dahulu viral.

AI museum bahkan menyediakan fitur simulasi: “Rasakan Menjadi Netizen Tahun 2024”. Pengunjung cukup memakai helm sensor emosi, lalu sistem akan membanjiri mereka dengan: notifikasi, berita panas, komentar marah, dan video politik tanpa konteks. Sebagian besar pengunjung hanya bertahan tiga menit sebelum meminta keluar. Laporan medis museum menunjukkan: manusia abad ke-22 sudah tidak cukup kuat secara mental untuk hidup di era internet tahun 2024.

Di sudut paling gelap museum terdapat ruang khusus bernama: *Ruang Artefak Berbahaya*. Aksesnya dibatasi. Pengunjung harus berusia minimal tujuh belas tahun biologis

dan lolos pemeriksaan stabilitas emosi digital. Di balik kaca anti-ledakan retorika, tersimpan benda-benda paling mematikan dalam sejarah politik Indonesia: pengeras suara kampanye, akun *buzzer* otomatis, *template thumbnail* YouTube, dan rekaman *podcast* berdurasi empat jam tanpa kesimpulan.

Namun di tengah ruangan itu, terdapat satu benda yang paling dijaga. Sebuah mikrofon tua. Warnanya hitam kusam. Kabelnya sudah mengeras dimakan waktu. Tidak tampak istimewa. Tetapi di bawahnya tertulis peringatan: “PERANGKAT INI PERNAH DIGUNAKAN UNTUK MENJANJI SEGALA SESUATU KEPADA SEMUA ORANG SECARA BERSAMAAN.”

Pengunjung biasanya diam beberapa detik membaca kalimat itu. Mikrofon tersebut dianggap artefak paling berbahaya karena para sejarawan percaya: sebagian besar kekacauan politik abad ke-21 dimulai dari seseorang yang terlalu lama berbicara di depan alat itu.

Pengunjung berdiri lama di depan kaca museum, memandangi: baliho-baliho lapuk, slogan-slogan usang, meme politik, dan wajah-wajah lama yang dahulu memenuhi seluruh layar bangsa. Seolah seluruh abad ke-21 masih berbicara dari dalam artefak peninggalan sekitar 100 tahun lalu itu. Penulis merasa sedang mendengar pidato, debat, *podcast*, janji, slogan, kemarahan, optimisme, dan suara rakyat yang tidak pernah benar-benar berhenti berkomentar. Dan di tengah dunia yang dikelola algoritma sempurna, warisan terbesar manusia Indonesia abad ke-21 tetap bertahan sebagai peninggalan paling abadi: yakni omon-omon.

GLOSARIUM

Abad Jargon: Istilah satiris untuk menggambarkan periode politik Indonesia awal abad ke-21 ketika slogan, retorika, dan pidato dianggap lebih penting dibanding substansi kebijakan.

AI Demokrasi 5.0: Sistem kecerdasan buatan futuristik dalam narasi buku yang mengelola pemilu otomatis pada tahun 2126. Digambarkan lebih stabil daripada politisi manusia, tetapi tetap gagal memahami logika netizen Indonesia.

Algoritma Popularitas: Sistem digital yang menentukan tingkat keterpilihan politik berdasarkan viralitas, *engagement* media sosial, dan persepsi publik, bukan kualitas kebijakan.

Atlantis Jakarta: Istilah metaforis dalam buku untuk menggambarkan tenggelamnya Jakarta akibat krisis lingkungan dan pembangunan yang kalah cepat dari kenaikan permukaan laut.

Arsip Pertengkar Nasiona: Kumpulan rekaman debat, perang komentar, *podcast* politik, dan konflik digital elite Indonesia yang diabadikan dalam Museum Jargon Nasional tahun 2126.

Buzzer: Kelompok anonim atau semi-organik yang bekerja membentuk opini publik di media sosial melalui propaganda digital, perang tagar, dan manipulasi percakapan daring.

Demokrasi Karnaval: Istilah satiris untuk menggambarkan pemilu Indonesia sebagai festival hiburan massal yang dipenuhi konser, panggung musik, *merchandise*, dan politik visual.

Demokrasi Podcastik: Bentuk demokrasi modern ketika opini publik lebih dipengaruhi percakapan *podcast* dan konten digital dibanding forum akademik atau institusi resmi negara.

Drone Pembangunan: Simbol budaya pencitraan politik Indonesia yang menggunakan pengambilan gambar udara sinematik untuk menampilkan proyek infrastruktur sebagai konten heroik.

Era Pencitraan Infrastruktur: Periode ketika keberhasilan pembangunan lebih diukur dari kualitas video promosi dan visualisasi *drone* dibanding manfaat nyata bagi masyarakat.

Etika Kepala: Program studi satiris yang muncul setelah viralnya ucapan “Ndasmu Etika”, menggambarkan runtuhnya kesopanan politik digital.

Feodalisme Elektoral: Sistem demokrasi modern yang secara formal memakai pemilu, tetapi secara praktik tetap diwariskan melalui keluarga politik dan elite kekuasaan.

Generasi Eta (Gen Eta): Generasi manusia yang lahir sekitar tahun 2100 – 2114, berdasarkan teori yang dirumuskan oleh lembaga demografi McCrindle Research. Mereka mempelajari sejarah politik Indonesia melalui meme, arsip digital, dan museum hologram di tahun 2126, tepat 100 tahun setelah era omon-omon.

Inflasi Jargon Pembangunan: Fenomena ketika istilah seperti “transformasi”, “hilirisasi”, “Indonesia Emas”, dan “revolusi” digunakan terlalu sering hingga kehilangan makna konkret.

Indonesia Emas: Slogan pembangunan nasional futuristik yang dipakai hampir semua elite politik, tetapi tetap ambigu

sehingga dapat diartikan sesuai kepentingan masing-masing pihak.

Kementerian Pencitraan Republik Indonesia: Lembaga satiris imajiner yang melambangkan budaya politik visual, *branding* negara, dan obsesi pencitraan pembangunan.

Kerajaan Demokrasi: Istilah satire untuk menggambarkan demokrasi Indonesia yang masih dipengaruhi budaya dinasti keluarga dan oligarki elite.

Mikrofon: Simbol paling berbahaya dalam buku. Melambangkan kemampuan pidato politik untuk menjanjikan segalanya tanpa kewajiban merealisasikan apa pun.

Museum Jargon Nasional: Museum futuristik dalam epilog buku yang menyimpan peninggalan politik Indonesia abad ke-21 seperti baliho, meme, *podcast*, dan slogan kampanye.

Nasionalisme Karbohidrat: Istilah hiperbolik dalam Bab 2 untuk menggambarkan budaya politik yang percaya bahwa masalah bangsa dapat diselesaikan melalui program makan gratis.

Netizen Permanen: Tahap evolusi manusia digital yang hidup hampir sepenuhnya di media sosial dan menghabiskan energi politik melalui komentar daring.

Ndasmu Etika: Ucapan politik viral yang dalam buku ini dianggap sebagai simbol runtuhnya kesopanan politik nasional dan kemenangan budaya viral atas substansi.

Oligarki Modern: Jaringan elite ekonomi dan politik yang mengendalikan pengaruh besar negara melalui modal, media, dan hubungan kekuasaan.

Omon-Omon: Istilah populer Indonesia untuk ucapan besar, janji politik, atau retorika yang belum tentu memiliki realisasi nyata.

Politik Kamera: Budaya pemerintahan yang lebih fokus pada dokumentasi visual dan viralitas media dibanding efektivitas kebijakan publik.

Politik *Thumbnail*: Fenomena ketika kualitas diskusi politik diukur dari desain *thumbnail* YouTube, ekspresi wajah dramatis, dan potensi viral.

Republik Retorika: Konsep utama buku yang menggambarkan Indonesia sebagai bangsa yang bertahan hidup melalui produksi slogan, pidato, dan narasi optimistis.

Republik Konten: Istilah untuk menggambarkan perubahan politik menjadi industri hiburan digital berbasis *engagement*, algoritma, dan viralitas.

Ruang Artefak Berbahaya: Bagian khusus Museum Jargon Nasional yang menyimpan benda-benda politik paling destruktif, terutama mikrofon dan perangkat propaganda digital.

Seremonial Nasional: Budaya politik yang sangat bergantung pada peresmian, pidato, gunting pita, dan simbol-simbol visual kenegaraan.

Suku Netizen: Kelompok sosial terbesar Indonesia digital yang identitas politiknya dibangun melalui media sosial dan kolom komentar.

Thumbnailisasi Demokrasi: Transformasi demokrasi menjadi budaya visual digital, ketika persepsi politik dibentuk melalui potongan video, thumbnail, dan konten pendek.

Transformasi Nasional: Istilah pembangunan serbaguna yang sering digunakan elite politik untuk menggambarkan hampir semua program pemerintah tanpa penjelasan rinci.

Warisan Omon-Omon: Peninggalan budaya politik Indonesia berupa slogan, pidato, janji, dan arsip debat yang terus diwariskan lintas generasi.

Warganet Permanen: Manusia modern yang secara psikologis lebih aktif hidup di internet dibanding di ruang sosial nyata.

“Yang Penting Viral”: Filosofi tidak resmi politik digital Indonesia ketika popularitas media sosial dianggap lebih penting dibanding kualitas substansi kebijakan.

DAFTAR PUSTAKA

Budiardjo, Miriam. (2013). *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Buku pengantar klasik ilmu politik Indonesia yang menjelaskan konsep demokrasi, kekuasaan, partai politik, dan sistem pemerintahan modern.

Subiakto, Henry. (2015). *Komunikasi Politik, Media, dan Demokrasi*. Membahas hubungan media, komunikasi politik, propaganda, pencitraan, dan demokrasi digital di Indonesia modern. Sangat relevan untuk tema politik media sosial dan budaya viral.

Tapsell, Ross. (2019). *Kuasa Media di Indonesia: Kaum Oligarki, Warga, dan Revolusi Digital*. Kajian penting mengenai oligarki media, kekuatan elite digital, serta transformasi politik Indonesia di era media sosial dan internet.

Winters, Jeffrey A. (2011). *Oligarchy*. Kajian teoritis internasional tentang oligarki modern dan hubungan elite ekonomi dengan kekuasaan politik demokratis.

Robison, Richard & Hadiz, Vedi R. (2004). *Reorganising Power in Indonesia: The Politics of Oligarchy in an Age of Markets*. Analisis tentang transformasi kekuasaan pasca-Reformasi Indonesia dan bertahannya elite oligarki dalam sistem demokrasi modern.

Hadiz, Vedi R. (2016). *Islamic Populism in Indonesia and the Middle East*. Membahas populisme, politik identitas, dan mobilisasi massa dalam demokrasi Indonesia kontemporer.

Fachrudin, Achmad. (2022). *Oligarki Demokrasi dan Konglomerasi Media Massa*. Mengulas hubungan media,

konglomerasi ekonomi, dan dominasi elite dalam demokrasi Indonesia modern.

Noor, Firman. (2022). *Demokrasi dan Oligarki*. Membahas paradoks demokrasi Indonesia yang tetap dipengaruhi kelompok elite dan kekuatan modal politik.

Aminuddin, M. Faishal & Prasetyawan, Wahyu. (2022). *Pasang Surut Demokrasi: Refleksi Politik Indonesia 1999–2019*. Refleksi kritis mengenai perkembangan demokrasi Indonesia setelah Reformasi, termasuk polarisasi politik dan perubahan budaya demokrasi.

Abdillah, Leon Andretti. (2014). *Social Media as Political Party Campaign in Indonesia*. Penelitian mengenai penggunaan media sosial sebagai alat kampanye politik digital di Indonesia sejak Pemilu 2014.

Abdillah, Leon Andretti. (2014). *Indonesian's Presidential Social Media Campaigns*. Kajian tentang kampanye presiden Indonesia berbasis Facebook dan Twitter serta transformasi komunikasi politik digital.

Stier, Sebastian et al. (2018). *Election Campaigning on Social Media: Politicians, Audiences and the Mediation of Political Communication on Facebook and Twitter*. Penelitian internasional tentang bagaimana media sosial mengubah perilaku kampanye politik dan komunikasi kandidat.

Yang, Xinxin et al. (2016). *Social Politics: Agenda Setting and Political Communication on Social Media*. Membahas bagaimana media sosial membentuk agenda politik, opini publik, dan komunikasi elite politik modern.

Laksono, Puji. (2020). *Komunikasi Massa dan Demokrasi dalam Arus Sistem Politik*. Kajian hubungan komunikasi

massa, media, dan demokrasi dalam sistem politik modern Indonesia.

Rianto, Puji. (2019). *Perbandingan Paradigma Otoritarianisme dan Demokrasi dalam Regulasi Media Massa di Indonesia*. Menganalisis hubungan media, demokrasi, dan regulasi informasi dalam sistem politik Indonesia.

Taryana, Ade & Rusadi, Udi. (2025). *Ekonomi Politik Disrupsi Digital dan Polarisasi Konten Media*. Membahas dominasi platform digital global, polarisasi media, dan ekonomi politik algoritma di Indonesia modern.

Anom, Erman et al. (2021). *Politics and Media Hegemony Policy in Indonesia*. Kajian tentang hegemoni media, kebijakan politik, dan pengaruh kekuasaan terhadap pembentukan opini publik.

McQuail, Denis. (2011). *Teori Komunikasi Massa*. Referensi klasik teori media massa, propaganda, budaya populer, dan pengaruh media terhadap masyarakat modern.

Sobur, Alex. (2009). *Analisis Teks Media*. Buku metodologis untuk memahami framing media, semiotika politik, dan produksi makna dalam komunikasi massa.

Morissan. (2015). *Teori Komunikasi: Individu hingga Massa*. Menjelaskan teori komunikasi modern, media massa, dan perilaku publik dalam era informasi digital.

Heryanto, Ariel. (2015). *Identitas dan Kenikmatan: Politik Budaya Layar Indonesia*. Membahas hubungan budaya populer, media, identitas politik, dan masyarakat Indonesia pasca-Reformasi.

Debord, Guy. (1967). *The Society of the Spectacle*. Teori klasik mengenai masyarakat tontonan, budaya visual, dan dominasi citra dalam kehidupan modern.

Baudrillard, Jean. (1981). *Simulacra and Simulation*. Teori filsafat tentang simulasi, hiperrealitas, dan dunia modern yang lebih percaya citra dibanding kenyataan.

Orwell, George. (1949). *Nineteen Eighty-Four*. Novel distopia klasik tentang propaganda, manipulasi bahasa, pengawasan, dan kekuasaan politik.

Huxley, Aldous. (1932). *Brave New World*. Novel satiris futuristik mengenai masyarakat modern yang dikendalikan hiburan, konsumsi, dan manipulasi psikologis.

Eco, Umberto. (1994). *How to Travel with a Salmon and Other Essays*. Kumpulan esai satiris mengenai budaya modern, media, dan absurditas komunikasi manusia.

Reddit Indonesia Archive. (2019–2025). *Diskursus Publik tentang Politik Digital Indonesia*. Arsip percakapan publik daring mengenai *buzzer*, oligarki, polarisasi politik, budaya komentar, dan demokrasi digital Indonesia.



TENTANG PENULIS

Endang Suherman adalah penulis, pemerhati sosial-politik, dan pengelola media yang memiliki minat pada isu demokrasi, komunikasi politik, kebijakan publik, serta dinamika budaya digital di Indonesia. Buku

Seri Satire Politik Republik Omon-Omon: 100 Tahun Warisan Jargon Politik Indonesia Raya merupakan bagian dari upaya mendokumentasikan fenomena politik Indonesia melalui pendekatan satire.

Dengan menggunakan sudut pandang imajiner dari tahun 2126, buku ini mengajak pembaca melihat kembali berbagai gejala politik abad ke-21 sebagai artefak budaya yang suatu hari mungkin akan dipelajari sebagaimana kita mempelajari peninggalan peradaban masa lalu.

Bagi penulis, satire bukanlah sekadar cara untuk menertawakan kekuasaan, melainkan cara untuk memahami bagaimana sebuah masyarakat berbicara tentang dirinya sendiri. Karena sering kali, sejarah tidak hanya ditentukan oleh keputusan besar para pemimpin, tetapi juga oleh kata-kata yang terus diulang, dipercaya, diperdebatkan, dan diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya.

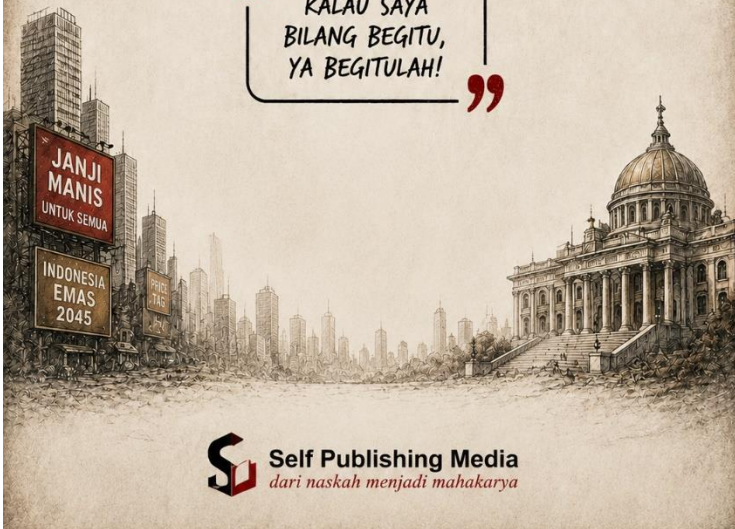
Penulis meyakini bahwa demokrasi yang sehat membutuhkan ruang untuk kritik, refleksi, dan humor. Sebab bangsa yang mampu menertawakan dirinya sendiri biasanya lebih siap menghadapi kenyataan daripada bangsa yang hanya sibuk mengagumi pidatonya.

★ SERI SATIRE POLITIK ★

REPUBLIK OMON-OMON

100 TAHUN WARISAN JARGON POLITIK INDONESIA RAYA

“ KALAU SAYA
BILANG BEGITU,
YA BEGITULAH! ”



Self Publishing Media
dari naskah menjadi mahakarya